

EVALUASI MODEL CIPP

(Context, Input, Process, & Product)

DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

**Dr. Ir. Amiruddin, S.T., M.T., IPM.
Wirawan Setialaksana, S.Pd., M.Sc.**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA**

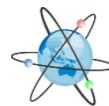
- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

EVALUASI MODEL CIPP (*CONTEXT, INPUT, PROCESS, & PRODUCT*) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

**Dr. Ir. Amiruddin, S.T., M.T., IPM.
Wirawan Setialaksana, S.Pd., M.Sc.**

2023

Global Research and Consulting Institute (Global-RCI)



Judul : **EVALUASI MODEL CIPP (*context, input, process, & product*)
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**
Penulis : **Dr. Ir. Amiruddin, S.T., M.T., IPM & Wirawan Setialaksana,
S.Pd., M.Sc.**

ISBN: 978-623-6339-53-4

Penyunting : Hamzah Upu
Perancang Sampul : Alif Rezky
Penata Letak : Erdin
Isi : Sepenuhnya tanggung jawab penulis
Source : Canva.com

Anggota IKAPI : No. 020/SSL/2018

Diterbitkan Oleh:



Global Research and Consulting Institute (Global-RCI)

Kompleks Perumahan BTN Saumata Indah blok B/12 Lt.3
Jl. Mustofa Dg. Bunga, Romang polong, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia.
92113. Email:globalresearchmakassar@gmail.com, Telp.
081355428007/085255732904

Cetakan Pertama, Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta ©2023 pada penulis

Hak penerbitan pada Global RCI. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apapun harus mendapat izin tertulis dari penulis dan Penerbit Global RCI

All Rights Reserved

Amiruddin & Wirawan Setialaksana

EVALUASI MODEL CIPP (*context, input, process, & product*) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/Amiruddin, & Setialaksana, Wirawan:

– cetakan I – Makassar: Global RCI, 2023

viii + 132 hal.; 15,5 x 23 cm

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini kami tujukan sebagai referensi dan panduan bagi dosen, guru, dan mahasiswa, dalam melaksanakan penelitian khususnya tentang “EVALUASI MODEL CIPP DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN”

Buku ini merupakan salah satu bagian dari riset tentang KEEFEKTIFAN SMK 3 TAHUN DAN SMK 4 TAHUN SEBAGAI SISTEM SEKOLAH MELALUI EVALUASI MODEL CIPP. Buku ini secara umum memaparkan tentang penjelasan konsep Evaluasi Model CIPP yaitu *Context, Input, Process, & Product* mulai dari Latar belakang riset, Konsep Keefektifan Sekolah Menengah Kejuruan, kebijakan dan eksistensi program sekolah menengah kejuruan (**context**), karakteristik siswa, guru, dan kepala sekolah (**input**), kepemimpinan dan proses pembelajaran (**process**), dan keefektifan SMK dalam meningkatkan prestasi siswa (**product**).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku ini sehingga dapat disajikan kepada guru dan dosen, terkhusus kepada Tim Editor. Namun demikian buku ini pastilah tak luput dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, berbagai macam perbaikan termasuk saran dan kritik dari pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Makassar, Juni 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI



HALAMAN SAMBUL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KONSEP KEEFEKTIFAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN..	13
A. Pendidikan Kejuruan.....	13
B. Sekolah Menengah Kejuruan sebagai Sistem Pendidikan.....	14
C. Keefektifan Sekolah Menengah Kejuruan.....	16
BAB 3 KEBIJAKAN DAN EKSISTENSI PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (CONTEXT)	23
A. KEBIJAKAN PROGRAM SMK	23
B. EKSISTENSI PROGRAM SMK.....	26
BAB 4 KARAKTERISTIK SISWA, GURU, DAN KEPALA SEKOLAH (INPUT).....	33
A. Karakteristik Status Sosial Ekonomi Siswa	33
B. Kualifikasi Pendidikan, Pengalaman Pelatihan dan Masa Kerja Guru.....	38
C. Pembinaan dan Mengembangkan Keprofesionalan Guru.....	50
D. Kriteria Kepala Sekolah di SMK	55

BAB 5	KEPEMIMPINAN DAN PROSES PEMBELAJARAN	
	(PROCESS).....	59
A.	Kepemimpinan Pembelajaran di SMK	59
B.	Keefektifan Proses Pembelajaran di Sekolah.....	92
C.	Keefektifan Pembelajaran di DU-DI	100
BAB 6	KEEFEKTIFAN SMK DALAM MENINGKATAN PRESTASI	
	SISWA (PRODUCT).....	105
DAFTAR PUSTAKA	113
BIODATA PENULIS	131

BAB 1

PENDAHULUAN



Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan oleh DU-DI dan memberikan bekal kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Clarke and Winch (2007:9) mendefinisikan bahwa “vocational education is confined to preparing young people and adults for working life, a process often regarded as of a rather technical and practical nature”. Dharma, dkk (2013:7) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kerja dan mandiri dalam bidang tertentu, juga harus berdasarkan tiga filosofi sentral, yaitu: (1) realitas kompetensi yang diajarkan di pendidikan kejuruan sama dengan di DU-DI; (2) keberadaan pendidikan kejuruan yang ada di sekolah sama dengan di DU-DI; dan (3) nilai pendidikan kejuruan yang ada di sekolah sama dengan di DU-DI.

Pendidikan Kejuruan formal pertama dimulai ditingkat sekolah menengah yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMK merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang

tertentu. Masa studi siswa jenjang SMK dilaksanakan selama tiga sampai empat tahun. SMK yang menerapkan masa studi pembelajaran selama empat tahun, terbagi menjadi tiga tahun masa studi di sekolah dan satu tahun di industri jurusan terkait.

SMK merupakan suatu sistem organisasi sekolah yang terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan. Sonhadji (2014:7) menguraikan bahwa “suatu sistem terdiri dari tiga komponen, yaitu: masukan (input), proses (process), dan luaran (outputs). Belakangan ini, suatu sistem dapat diperluas sampai dengan lingkungan (environment), hasil (outcomes), dan dampak (impacts)”. Sekolah sebagai sistem organisasi juga merupakan subsistem sosial yang berfungsi mengintegrasikan semua subsistem didalamnya, baik penyusunan tujuan dan nilai dari masyarakat untuk menentukan tujuan sekolah maupun penggunaan pengetahuan untuk menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan keperluan masyarakat sebagai suatu keunikan (Syafaruddin, 2008:102).

Slamet (2001:4) mengemukakan bahwa “sekolah sebagai sistem yang secara universal memiliki komponen input, proses, dan output”. Lunenburg (2010:4) mengemukakan bahwa “schools are social systems in which two or more persons work together in a coordinated manner to attain common goals. All schools are open systems. An open system consists of five basic elements: inputs, a transformation process, outputs, feedback, and the environment”. Komponen-komponen sistem sekolah terdiri dari masukan (input), proses (process), keluaran (product), masing-masing elemen saling terkait dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sonhadji (2013:94) mengungkapkan bahwa “pada lembaga

pendidikan terjadi transformasi SDM, yaitu input (masukan peserta didik) diproses dalam suatu sistem pendidikan dan pembelajaran, menghasilkan output (kompetensi lulusan) dan outcomes (kinerja lulusan)''.

Tilaar (2011:14) mengemukakan bahwa "suatu organisasi yang efektif akan mendukung proses manajemen sistem pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional". Sistem keefektifan sekolah tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik manajemen berbasis sekolah (MBS). Sehingga penguraian karakteristik MBS yang juga merupakan karakteristik sekolah efektif berdasarkan pada input, proses, dan output (Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:20).

Dirjen PMPTK Diknas (2010:20-36) menguraikan MBS dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu input-proses-output untuk memandunya. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sistem sehingga penguraian karakteristik MBS, juga karakteristik sekolah efektif. Selanjutnya, uraian ini diambil secara singkat yang dimulai dari output dan diakhiri input sebagai berikut output (produk) sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah, yang di bagi menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik (academic achievement) dan output berupa prestasi non-akademik (non-academic achievement). Output prestasi akademik misalnya, NUN/NUS, lomba karya ilmiah, dll. Output non-akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri, prestasi olahraga, kesenian, dll.

Keefektifan sekolah memiliki sejumlah karakteristik proses diantaranya, 1) proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi, 2)

kepemimpinan sekolah yang kuat, 3) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, 4) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, 5) sekolah memiliki budaya mutu, 6) sekolah memiliki “teamwork” yang kompak, cerdas, dan dinamis. 7) sekolah memiliki kewenangan, 8) partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat, 9) sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen, 10) sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisik), 11) sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, 12) sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, 13) memiliki komunikasi yang baik, 14) sekolah memiliki akuntabilitas, 15) manajemen lingkungan hidup sekolah bagus, dan 16) sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas (Dirjen PMPTK Diknas, 2010:21).

Adapun Input Pendidikan yang terdiri dari: 1) Memiliki Kebijakan, Tujuan, dan Sasaran Mutu yang Jelas, 2) Sumberdaya Tersedia dan Siap, 3) Staf yang Kompeten dan Berdedikasi Tinggi, 4) Memiliki Harapan Prestasi yang Tinggi, 5) Fokus pada Pelanggan (Khususnya Siswa). Dan Input Manajemen yang terdiri dari: 1) urusan-urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab sekolah, 2) pengelolaan proses belajar mengajar, 3) perencanaan dan evaluasi, 4) pengelolaan kurikulum, 5) pengelolaan ketenagaan (pendidik dan tenaga kependidikan), 6) pengelolaan fasilitas (peralatan dan perlengkapan), 7) pengelolaan keuangan, 8) pelayanan siswa, 9) hubungan sekolah-masyarakat dan 10) pengelolaan kultur sekolah

Scheerens (2001:18) mendefinisikan keefektifan sekolah berdasarkan kinerja sekolah bahwa “school effectiveness refers to the performance of the organizational unit called ‘school’. The performance of the school can be expressed as the output of the

school, which in turn is measured in terms of the average achievement of the pupils at the end of a period of formal schooling”. Persoalan keefektifan sekolah menarik karena secara umum dapat diketahui bahwa kinerja sekolah itu berbeda-beda. Sedangkan Rawita (2011:18) mendefinisikan bahwa keefektifan sekolah adalah “sekolah yang mampu meminimalisasi hambatan-hambatan itu dapat dikategorikan sebagai sekolah yang memiliki efektivitas yang tinggi”.

Brookover & Lezotte (di dalam Saleem F., et. al., 2012:243) mengemukakan tujuh indikator keefektifan sekolah yaitu “(1) instructional leadership; (2) clear vision and mission; (3) safe and orderly environment; (4) high expectations for students achievement; (5) continuous assessment of student achievement; (6) opportunity and time on task; and (7) positive home-school relations”. Faktor-faktor yang menentukan keefektifan sekolah yaitu tujuan sekolah, kurikulum, pembelajaran, penilaian dan evaluasi, manajemen ruang kelas, kepemimpinan, keterlibatan masyarakat, lingkungan aman dan tertib, profesionalisme, motivasi siswa, lingkungan rumah, harapan tinggi, pengembangan profesional, keterampilan sosial, jaminan kualitas, dan koordinasi antara kepala sekolah dan staf (Saleem, et al. 2012:243).

Karakteristik keefektifan sekolah pada umumnya antara lain proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat, sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, dan sekolah

memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas (Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:21).

Loukeris, et al. (2009:161) memberikan variabel keefektifan sekolah yaitu “some of these variables are school financing and autonomy, school climate, openness to the community, flexibility, pedagogical innovation, and active involvement of those concerned with the organisation and implementation of the curriculum”. Sammons, et al. (1995:12) memberikan karakteristik keefektifan sekolah berdasarkan bukti-bukti penelitian yang relevan yaitu “professional leadership, shared vision and goals, a learning environment, concentration on teaching and learning, purposeful teaching, high expectations, positive reinforcement, monitoring progress, pupil rights and responsibilities, home-school partnership, and a learning organization”.

Purkey dan Smith (1983:444) memberikan fitur-fitur karakteristik keefektifan sekolah, yaitu kepemimpinan pembelajaran, manajemen sekolah, stabilitas staf, artikulasi dan organisasi kurikulum, pengembangan dan pembinaan staf sekolah, keterlibatan dan dukungan orang tua, prestasi akademik sekolah, penggunaan waktu dan dukungan pemerintah. Rawita (2011:28) mendefinisikan pengelolaan SMK sebagai keefektifan sekolah sebagai “keberhasilan sekolah menengah kejuruan untuk mencapai suatu hasil yang relevan, yang dapat dilihat dari aspek pengelolaan (1) kegiatan belajar mengajar (KBM), (2) SDM, (3) sarana dan prasarana, (4) penunjang, dan (5) kerja sama”. Asian Development Bank (2014:2) mengungkapkan sistem TVET dapat dievaluasi berdasarkan tiga kriteria utama yaitu ”1) Relevance, or external efficiency (relevansi atau efisiensi eksternal): 2) Effectiveness

(keefektifan): 3) Internal efficiency (efisiensi internal)”.

Puyate, S.T. (2008:71) merekomendasikan keefektifan pelaksanaan pendidikan kejuruan diantaranya bahwa “sarana dan prasarana yang memadai, materi pelajaran yang terkait, perpustakaan harus yang memadai, ruang kelas yang lebih representatif, guru harus digaji dan dibayar tepat waktu; guru diberi tunjangan dan insentif lainnya, guru yang profesional dan berpengalaman, terjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa, ikut pelatihan secara reguler dan berkala untuk mensimulasikan minat guru terhadap kejuruan, orang tua dan guru harus mendorong siswa untuk mengembangkan sikap positif terhadap pengetahuan dan keterampilan, memiliki guru bimbingan dan konseling untuk mendorong siswa ke mata pelajaran kejuruan, dan kurikulum sekolah kejuruan harus terencana dengan baik”.

Program SMK 4 tahun maupun SMK 3 tahun merupakan sebuah sistem sekolah dan keefektifan sistem sekolah dapat diukur dengan dilakukan evaluasi yang komprehensif. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa “(1) evaluasi dilakukan untuk mengendalikan mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan; dan (2) evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan”.

Berdasarkan definisi Scriven menyebutkan bahwa evaluasi pendidikan kejuruan adalah untuk menetapkan dan menilai kelayakan program, yaitu “the evaluation of vocational training programmes can

be regarded as a procedure intended to determine the merit, worth or value these programmes” (Seyfried, 1998:14). Sedangkan Cynthia and Rowan (2012:23), mengungkapkan bahwa “evaluating the effectiveness of a training program also indicates the significance of how well the training purposes have been attained, and whether the best means for achieving those purposes have been employed”.

Mengevaluasi keefektifan SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun menunjukkan seberapa baik prestasi belajar siswa yang telah dicapai dan bagaimana usaha yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Anton and Jordan (2004:19-20) mengungkapkan bahwa “quality may be viewed as a multi-dimensional concept composed of three interrelated dimensions, the quality of the human and material resource available (input), the quality of the management and teaching/learning processes taking place (processes), and the quality of the results (outputs or outcomes)”.

Hew, et al. merekomendasi bahwa SMK dapat dikategorikan sebagai lembaga yang makro, maka evaluasi yang digunakan adalah “Context, Input, Process, Product (CIPP) included in the category of macro-level evaluation as a useful model for answering important questions about online education programs” (Tokmak, et. al, 2013:274).

Evaluasi CIPP yang dipopulerkan oleh Stufflebeam & Shinkfield dapat memberikan alternatif dalam pengambilan keputusan keefektifan kepemimpinan pembelajaran. Stufflebeam & Shinkfield (2007:325) menyebutkan bahwa “Stufflebeam’s context, input, process, and product evaluation model is a comprehensive framework for conducting formative and summative evaluations of projects, personnel, products, organizations, and evaluation systems”.

Konteks berpengaruh pada input, input berpengaruh pada proses, dan proses berpengaruh pada product. Tokmak, et.al (2013:290) mengungkapkan bahwa kelebihan penggunaan evaluasi model CIPP berdasarkan sumber data, yaitu “the CIPP model used in this study enabled the researchers to focus on content, input, process, and products of the online master’s program from the perspectives of different stakeholders: students, instructors, and managers”. Hal ini sesuai amanat Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 yang berbunyi bahwa “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”.

Zhang, et.al (2011) menguraikan secara jelas komponen-komponen evaluasi yang dapat membantu evaluasi CIPP, yaitu “the input evaluation component can then help prescribe a responsive project that can best address the identified needs. Next, the process evaluation component monitors the project process and potential procedural barriers, and identifies needs for project adjustments. Finally, the product evaluation component measures, interprets, and judges project outcomes and interprets their merit, worth, significance, and probity”. McNamara, Joyce, and O’Hara (2010:553) mengungkapkan pentingnya evaluasi efektif karena berkontribusi terhadap kualitas, yaitu “effective evaluation is a significant contributor to quality but does not necessarily guarantee that those in authority will heed the outcomes of evaluation and take necessary corrective action”.

Berbagai literatur tentang keefektifan SMK sebagai sistem sekolah, maka dalam penelitian ini ditentukan masing-masing variabel

yang dianggap urgen dalam mempengaruhi prestasi belajar siswa SMK.. Variabel konteks dalam penelitian ini yang berefek pada prestasi belajar mengacu pada yang dikemukakan Levaci´c, R (2007:385) bahwa “in the basic model, pupil outcomes (outputs) are determined by some combination and interaction of the contextual, input and process variables. Contextual variables (e.g., school type, governance, local community and social composition) are not directly under school control, especially in the short term”. Berbagai pakar di bidang ekonom dan keefektifan sekolah yang bekerja dalam kerangka teori yang sama, tapi menekankan aspek yang berbeda dalam memandang keefektifan sekolah dan fungsi pendidikan yang dikembangkan selama 35 tahun terakhir berdasarkan evaluasi konteks, input, proses dan produk.

Berdasarkan uraian argumen dari para peneliti dan pakar tentang definisi, karakteristik, dan komponen-komponen keefektifan sekolah, maka dipandang perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif melalui evaluasi model CIPP tentang keefektifan SMK. Penggunaan evaluasi model CIPP yang efektif dalam penelitian keefektifan kepemimpinan pembelajaran di SMK dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelayakan prestasi belajar siswa berdasarkan perspektif pemangku kepentingan sekolah serta dapat memberikan kontribusi secara signifikan peningkatan prestasi belajar siswa.

Hasil observasi dan wawancara awal peneliti pada salah satu SMK baik SMK 3 tahun maupun SMK 4 Tahun, diperoleh informasi awal bahwa SMK tersebut belum mengevaluasi dan memfokuskan tentang keefektifan sekolah selama ini. Fakta tersebut di atas, perlu mendapatkan perhatian agar keefektifan SMK yang selama ini belum terevaluasi secara komprehensif dapat dilaksanakan. Namun demikian,

pada penulisan buku edisi ini pembahasan hanya dibatasi pada penjelasan setiap variabel penelitian sebagai konsep,

Atas dasar rasionalisasi tersebut, maka perlu dilaksanakan Studi Literatur tentang keefektifan SMK melalui evaluasi model *CIPP* (*Context, Input, Process, and Product*) untuk keefektifan SMK yang meliputi penjelasan tentang: **a. Konteks (context)**: (1) kebijakan SMK dan (2) eksistensi program SMK; **b. Masukan (input)**: (1) latar belakang status sosial-ekonomi siswa di SMK, (2) kualifikasi pendidikan, pengalaman pelatihan dan masa kerja guru, (3) pembinaan dan pengembangan keprofesionalan guru, dan (4) kriteria kepala sekolah di SMK; **c. Proses (process)**: (1) kepemimpinan pembelajaran di SMK, (2) keefektifan proses pembelajaran di sekolah SMK, dan (3) keefektifan proses pembelajaran di DU-DI; **d. Produk (product)**: keefektifan SMK

BAB 2

KONSEP KEFEKTIFAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



A. Pendidikan Kejuruan

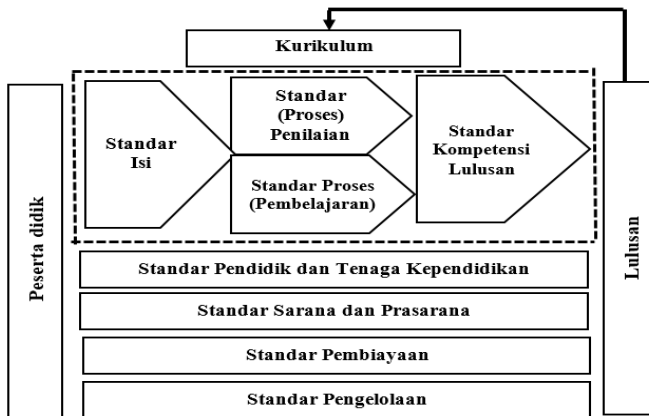
Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan oleh DU-DI dan memberikan bekal kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan kejuruan sangat berhubungan erat dengan keterampilan dalam menggunakan alat dan mesin-mesin, pendidikan kejuruan diasumsikan memiliki aksi reaksi antara pengetahuan umum dengan pengetahuan khusus, pengetahuan teori dengan pengetahuan praktik, pemahaman konsep dengan kepemilikan keterampilan, kemampuan kreatif dengan kemampuan reproduktif, keterampilan intelektual dengan kemampuan fisik, dan persiapan untuk kehidupan dengan persiapan untuk bekerja” (Pavlova, 2009:45). Pendidikan kejuruan memiliki fungsi ganda apabila direncanakan dan dilaksanakan secara cermat, mantap, terkendali sesuai dengan perkembangan peserta didik.

Hasil yang dicapai dari pendidikan kejuruan berkontribusi pada tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang dikemukakan

Djojonegoro (1998:35) bahwa “pendidikan kejuruan memiliki multi-fungsi yang apabila dilaksanakan dengan baik akan berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional”. Henry dan Thompson (dalam Berg, 2002:45) mengungkapkan bahwa pendidikan kejuruan disamakan dengan belajar untuk mendapatkan pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknik. Sehingga pendidikan kejuruan dapat memberikan sumbangsih yang besar pada peningkatan perekonomian suatu bangsa. Berdasarkan pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja dan usaha mandiri dalam bidang tertentu sesuai dengan keahliannya dan memberikan bekal untuk mengembangkan potensi diri.

B. Sekolah Menengah Kejuruan sebagai Sistem Pendidikan

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari delapan standar, yaitu: (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi; (3) standar proses; (4) standar pendidikan dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan pendidikan; dan (8) standar penilaian pendidikan. SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.



Gambar 2.1 Keterkaitan 8 Standar Pendidikan Nasional

SMK merupakan sistem pendidikan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait dan keberhasilan suatu proses pendidikan di sekolah merupakan produk (*product*) dan hasil (*outcomes*) secara kolektif dari semua unsur *stakeholders* sekolah. Adapun komponen-komponen sistem dalam pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Coombs (dalam Sagala, 2013:18-19) yaitu (1) tujuan dan prioritas; (2) pelajar atau peserta didik; (3) manajemen; (4) struktur dan jadwal waktu; (5) isi bahan belajar; (6) guru dan pelaksana; (7) alat bantu belajar; (8) fasilitas; (9) teknologi; (10) pengawasan mutu; (11) penelitian; dan (12) biaya pendidikan.

Menurut Scott (dalam Lunenburg, 2010:1) sistem terbuka terdiri dari 5 (lima) elemen dasar yaitu: (1) *input* (masukan); (2) *a transformation process* (proses transformasi); (3) *output* (hasil); (4) *feedback* (umpan balik); dan *environment* (lingkungan). Sekolah merupakan sistem sosial, hal ini dikemukakan oleh Norlin (2009) bahwa

“schools are social systems in which two or more persons work together in a coordinated manner to attain common goals” (Lunenburg, 2010:1)

Wuradji (2011:7) membagi tiga hal yang menentukan keefektifan organisasi, yaitu: (1) keefektifan pada level individu (*individual effectiveness*); (2) keefektifan pada level kelompok (*group effectiveness*); dan (3) keefektifan pada level organisasi (*organization effectiveness*). Keefektifan sekolah ditunjang ketercapaian keefektifan individu dan keefektifan kelompok dalam mencapai tujuan pendidikan sehingga tingkat keefektifan sekolah ditunjukkan pada keefektifan pelaksanaan fungsi dan tujuan sekolah pada level individu dan kelompok.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SMK sebagai sistem pendidikan merupakan lembaga pendidikan yang bekerja melalui sistem sosial dan sistem terbuka yang terdiri dari elemen-elemen utama berupa masukan (*input*), proses (*process*), dan produk (*product*) yang efektif untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan dalam kerangka standar pendidikan nasional yang terdiri dari 8 standar baik SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun.

C. Keefektifan Sekolah Menengah Kejuruan

Sekolah adalah sistem organisasi yang menfokuskan pada bidang pendidikan. Keberhasilan organisasi ditentukan keefektifan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Keefektifan (efektivitas) adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, waktu) telah dicapai. Dalam bentuk persamaan, keefektifan adalah sama dengan hasil nyata dibagi hasil

yang diharapkan. (Sekolah merupakan sistem organisasi, maka sekolah juga memiliki keefektifan untuk mencapai tujuannya.

Scheerens (2000:20) mengungkapkan bahwa *"In school-effectiveness research not only are differences in overall performance assessed, but the additional question of causality is raised: which school characteristics lead to relatively higher performance, when the characteristics of the student populations are otherwise constant"*. Karakteristik sekolah efektif tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik manajemen berbasis sekolah (MBS). Karakteristik MBS memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif, yang dikategorikan menjadi *input*, proses, dan *output*. Dalam menguraikan karakteristik MBS, pendekatan sistem yaitu *input-process-output* digunakan untuk memandunya. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sistem (Dirjen PMPTK Diknas, 2010:20).

Keunggulan manajemen akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses peningkatan mutu pendidikan di tanah air. Sedangkan keunggulan SDM akan menentukan kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemenangan persaingan pada era global ini secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi dan manajemen yang kuat, sebagai ciri khas sekolah efektif (Depdiknas, 2009:1). Townsend (2007:3) mengemukakan bahwa penelitian keefektifan sekolah memiliki tujuan yang mendasari pengembangan secara praktis untuk perbaikan sekolah, tetapi ada beberapa perbedaan penting dan hubungan antara efektivitas sekolah dan peningkatan sekolah yang dapat diidentifikasi. Untuk membedakan keduanya ditunjukkan oleh Smink (1991:3) bahwa:

School effectiveness is concerned with results.

Researchers try to describe certain variables for school

success in measurable terms. On the other hand, school improvement places the accent on the process; here one finds a broad description of all the variables that play a role in a school improvement project. Both approaches need the other to successfully modernize the system.

Dari uraian diatas, keefektifan sekolah berkaitan dengan hasil dari sistem, sementara peningkatan mutu sekolah menekankan pada proses, evaluasi proses dalam suatu sistem merupakan variabel yang sangat berperan dalam penelitian peningkatan mutu sekolah. Van Kesteren (di dalam Scheerens, 2000:33) memberikan definisi keefektifan organisasi yaitu:

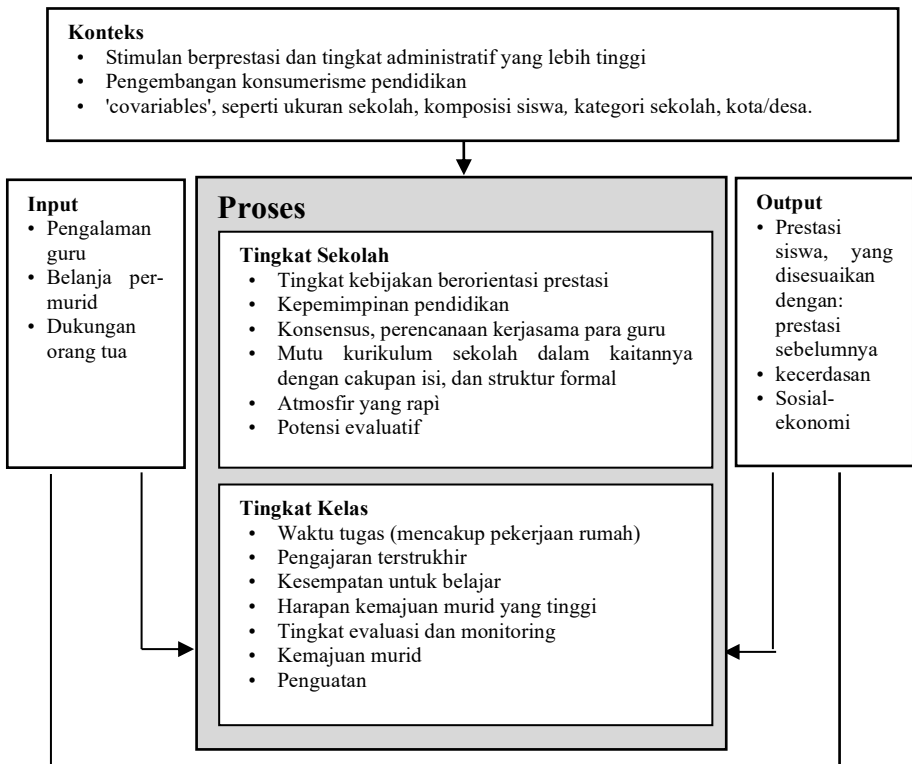
Efektivitas organisasi adalah kadar yang dimiliki sebuah organisasi, yang didasarkan atas manajemen yang kompeten, sambil menghindari usaha yang tidak perlu, di dalam lingkungan tempat di mana organisasi beroperasi yang kurang lebih kompleks, mengelola untuk mengontrol kondisi internal dan lingkungan organisasi, dalam rangka menunjukkan, demi proses transformasi dirinya sendiri, demi output yang diharapkan oleh konstituen eksternal.

Townsend (2007:4) mengungkapkan lima faktor yang menentukan keefektifitan sekolah yaitu *“substantial progress has been made from the early 1980s, when the five factor model of school effectiveness (leadership, instructional focus, climate conducive to learning, high expectations and consistent measurement of pupil achievement; Edmonds, 1979) was paramount”*.

Hal sama diungkapkan Ronald Edmonds dalam Beare (2007:33-34) yang mengidentifikasi lima karakteristik yang membuat keefektifan sekolah, yaitu :

The first was the leadership of the principal and his attention not merely to management but to what was going on in classrooms (instructional leadership). The effective school also had a broadly based and pervasive instructional focus; it concentrated on its educational program first and foremost (focus on learning). As a third quality, the school provided an orderly and safe climate conducive to teaching and learning; it was a safe environment in which students could learn, experiment, and make mistakes (a safe climate for learning). Fourthly, the school had high expectations of every student; every child was expected to succeed (high expectations). And finally, measures of pupil achievement were the basis for evaluating the school (planned achievement levels).

Berbagai pendekatan telah dilakukan berbagai pakar yang telah terintegrasi secara konseptual dan berbagai variabel, maka model konseptual yang dikembangkan menurut perspektif integratif ini meliputi model yang dikembangkan Scheerens (1990), Creemers (1994), dan Stringfield dan Slavin (1992), model Scheerens (2000:54) digunakan sebagai basis bagi meta-analisis sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Model Keefektifan Sekolah (dari Scheerens, 1990)

Kirk and Jones (2004:2) menunjukkan 7 (tujuh) yang berkorelasi dalam membangun sekolah efektif yaitu: “misi jelas sekolah, harapan yang tinggi untuk sukses, kepemimpinan instruksional, kesempatan untuk belajar dan waktu mengerjakan tugas, lingkungan yang aman dan tertib, hubungan rumah-sekolah yang positif, dan pemantauan kemajuan siswa. Berbagai pakar di bidang ekonom dan efektivitas sekolah bekerja dalam kerangka teori yang sama, tapi menekankan aspek yang berbeda dalam memandang sistem sekolah, Levaci’c, R (2007:385) menjelaskan bahwa:

In the basic model, pupil outcomes (outputs) are determined by some combination and interaction of the

contextual, input and process variables. Contextual variables (e.g., school type, governance, local community and social composition) are not directly under school control, especially in the short term. Two types of inputs are distinguished, resource inputs and pupil inputs. Resource inputs ... are subdivided into monetary (such as teachers, classroom support staff, administrative staff, learning resources and the upkeep of the school's physical environment) and real inputs (such as the pupil teacher or pupil staff ratio, stock of learning resources, facilities and space) Pupil inputs are the characteristics of the individual pupil that affect their learning outcomes (age, gender, ethnicity and family background) The pupil inputs are particularly crucial in assessing the productivity and efficiency of a school. To measure the impact of resource inputs, the pupil input variables that affect educational attainment must be controlled for.

Scheerens (2000:52) mengungkapkan Penelitian pendidikan yang berorientasi efektivitas yang telah ditinjau pada karakteristik 'material' sekolah (seperti gaji guru, fasilitas bangunan dan perbandingan guru/murid). Hasilnya agaknya mengecewakan karena tidak ada korelasi positif yang substansial dari investasi material dan prestasi pendidikan. Sehingga penelitian mutakhir menunjukkan bahwa:

The research movement known as research on exemplary effective schools (or effective-schools

research) focused more on the internal functioning of schools than the earlier tradition of input-output studies. These studies produced evidence that factors such as strong educational leadership, emphasis on basic skills, an orderly and secure climate, high expectations of pupil achievement and frequent assessment of pupil progress were indicative of unusually effective schools.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, definisi dan indikator keefektifan sekolah yang diungkapkan oleh para pakar pendidikan, maka terungkap gagasan baru tentang keefektifan SMK dengan berdasarkan pendekatan sekolah sebagai sistem sosial dan terbuka, sehingga keefektifan SMK dapat didekati dengan pendekatan sistem pendidikan yang terdiri dari, 1) konteks (*context*) melalui kebijakan dan eksistensi, 2) masukan (*input*) melalui karakteristik siswa, profil guru, pengembangan dan pembinaan guru dan kriteria kepala sekolah di SMK, 3) proses (*process*) melalui kepemimpinan instruksional, keefektifan proses pembelajaran di sekolah dan keefektifan proses pembelajaran di DU-DI, dan 4) luaran (*output*) prestasi belajar siswa SMK.

BAB 3

KEBIJAKAN DAN EKSISTENSI PROGRAM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (CONTEXT)



A. Kebijakan Program SMK

Pendidikan kejuruan di Indonesia dikategorikan pendidikan menengah seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan pendidikan vokasi dikategorikan pendidikan tinggi seperti akademi dan politeknik. Khusus untuk penelitian ini, akan di bahas pendidikan menengah kejuruan yang disebut SMK. Dalam penerapan di lapangan masih terdapat berbagai model SMK yang di Indonesia, seperti SMK 3 tahun, SMK 4 tahun dan SMK 3+1 (*community college*), walau sejak tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, jenis *community college* (akademi komunitas) berada pada pendidikan tinggi kejuruan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 pasal 1 disebutkan bahwa “yang maksud dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS”.

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pada Paragraf 2 Bentuk Satuan Pendidikan pasal 78 ayat 3 menyatakan bahwa *”SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja”.*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 tahun 2010 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010 pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa *”Peserta didik SMK 4 tahun mengikuti ujian sekolah paling cepat pada akhir tahun ketiga”.* Menarik dicermati bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 70 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, struktur kurikulum terdiri atas SMK/MAK 3 tahun dan SMK/MAK 4 tahun. Dari segi mata pelajaran yang diterapkan, kedua model masa studi SMK (3 tahun maupun 4 tahun) adalah sama, namun yang membedakan adalah model SMK masa studi 4 tahun memiliki tambahan 48 jam per minggu dalam 1 tahun.

Adanya alternatif model SMK dengan lama studi 3 tahun sampai model SMK dengan lama studi 4 tahun, maka masyarakat dan calon peserta didik dapat memilih orientasi SMK yang diminati. Kurikulum selama ini, termasuk kurikulum 2013 untuk SMK dibuat agar peserta didik siap untuk langsung bekerja di dunia kerja. Kontek kurikulum yang

ada di SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika masuk di dunia kerja. Dengan lama studi sekitar 3 atau 4 tahun, lulusan SMK diharapkan mampu untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang telah ditekuni.

Saat ini pemerintah telah melakukan penyesuaian secara periodik dan melibatkan penggunaan lulusan. Penyesuaian adalah mempertemukan antara sisi pasokan (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*) yang mencakup beberapa dimensi, yaitu kualitas, kompetensi, kuantitas, lokasi dan waktu. Penyesuaian juga mencakup pengembangan SMK 4 tahun yang memiliki nama kompetensi dan SKL yang berbeda dengan SMK 3 tahun (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016:47).

SMK bisa disebut pusat pendidikan, pelatihan, teknologi, produksi dan pemasaran. Hal ini karena dalam pendidikan SMK diajarkan berbagai keterampilan, keahlian atau kompetensi khusus, praktek di lapangan dan bahkan langsung terjun ke dunia kerja melalui praktek kerja lapangan. Sehingga diharapkan lulusan sekolah kejuruan tak menghasilkan pengangguran, namun dapat langsung terjun ke dunia kerja atau membuat usaha mandiri.

Namun yang pasti, kedua model ini berjalan masih tetap disetarakan dari semua aspek di DU-DI dan dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggodok aturan baru tentang durasi belajar di SMK. Dan mulai tahun 2015 durasi belajar pada SMK menjadi 4 (empat) tahun, walau tidak semua program studi menerapkan model 4 tahun ini. Waras (2014) memberikan penilaian bahwa ”komposisi 3+1 tahun yang akan

diterapkan di SMK ini, menitikberatkan praktik pada tahun keempat. Justru, hal ini baik karena satu tahun terakhir itu setara dengan komunitas akademi dan Diploma 1. Program SMK empat tahun yang diberlakukan secara nasional itu tidak untuk semua bidang keahlian. Masih ada bidang-bidang keahlian di SMK yang durasi belajarnya cukup tiga tahun saja”.

Pokok permasalahannya adalah program SMK yang mana dapat meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara lembaga pendidikan kejuruan dengan DU-DI. Hal ini telah diingatkan oleh Almeida et. Al. di dalam Eichhorst W., et. al (2012:1) bahwa *”by aligning the initial education more closely to particular vocations and tasks demanded in the labor market, the problem of mismatch, often seen as a main source of the high degree of unemployment in developing countries, may be reduced”*. Sehingga penting untuk menentukan dari awal jenis model pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja

B. Eksistensi Program SMK

Model SMK 3 tahun yang pada umumnya diterapkan selama ini dan model SMK 4 tahun yang hanya terdiri 12 SMK se- Indonesia. Keberadaan SMK 4 tahun masih dikategorikan memiliki tingkatan yang sama dengan SMK 3 tahun, namun waktu dan kompetensi yang berbeda. Beberapa rujukan keberadaan SMK 4 tahun di Indonesia, Pada tahun 1856 di Batavia didirikan sekolah pertukangan pertama (*Ambachts School*) dan pendidikan ini diperuntukan bumiputera. Siregar (2002:45) mengungkapkan bahwa *”sekolah ini mula-mula lamanya 2 tahun, tetapi kemudian diperpanjang menjadi 3 tahun.*

Kejuruan yang diajarkan adalah pengairan, pekerjaan umum, pengukuran tanah dan mesin. Pada tahun 1894 lama belajarnya ditambah lagi menjadi 4 tahun”.

Jokosumbogo B. (2002:101) menjelaskan sejarah pendirian IPT beralih fungsi menjadi cikal bakal SMK 4 tahun, sehingga pada tanggal 29 Juni 1971 disebutkan:

... dicanangkan Sistem Pendidikan Teknik Menengah 4 tahun yang diberi nama Proyek Perintis Sekolah Teknologi Menengah (STM) Pembangunan dengan 5 jurusan : Bangunan, Elektronika, Listrik, Mesin dan Otomotif (BELMO). Keputusan tersebut merupakan preseden bagi lokasi lainnya. Sebanyak 6 lokasi lain yang menjelma menjadi STM pembangunan 4 Tahun,... Sementara itu, 4 lokasi sisanya dikembangkan menjadi Sekolah Menengah Teknologi (SMT) Pertanian, masing-masing berlokasi di Metro, Tangerang, Boyolali dan Jember dengan lama belajar 3 Tahun.

Masa studi lebih lama dibandingkan dengan SMA dan STM lainnya yaitu 4 tahun, dan di beri nama “STM Pembangunan”. STM Pembangunan terdapat 8 (delapan) di seluruh Indonesia. Sejak tahun 1986 STM Pembangunan berubah nama menjadi ”STM Negeri Pembangunan” dan tahun 1997 diadakan penamaan ulang sekolah-sekolah termasuk STM Pembangunan menjadi SMK dengan diikuti nomor sekolah dan lokasi masing-masing.

Marlock (2011) mengemukakan bahwa “sebenarnya tiga tahun sudah cukup untuk menimba pengetahuan dan keterampilan. Tetapi ditambah satu tahun bagus untuk semakin mematangkan lulusan SMK, terutama supaya mereka punya sikap dewasa dan tangguh dalam dunia kerja”. Soenaryo (2002:79) menjelaskan perjalanan SMK 4 tahun bahwa:

Sebanyak 4 STM Pembangunan menghasilkan lulusan pertamanya pada tahun 1975 sejumlah 337 teknisi industri potensial dan kebanyakan dari mereka diserap oleh industri. Program tindak lanjut untuk mengikuti pekerjaan mereka di industri telah dilakukan bekerja sama dengan industri melalui forum penasehatan (*advisory forum*). Hal ini di pandang sangat penting tidak hanya untuk mengevaluasi proyek, melainkan juga untuk mengukur dampak terhadap industry. Dengan demikian, evaluasi bersifat menyeluruh terhadap seluruh sistem pendidikan teknik. Namun tantangan masih harus dihadapi dalam menyediakan tenaga kerja terampil yang memenuhi persyaratan (*qualified*) dan teknisi.

Di berbagai negara diterap program SMK 4 tahun, termasuk Jerman, Latvia, Albania, Rusia, Belanda, Philipina dan berbagai negara lainnya. Murugasu dalam Rashtriya T. (2008:40) menyatakan bahwa model ganda mencakup semua jenis program masa belajar suatu keahlian yang menawarkan pelatihan atau pendidikan kejuruan dengan

program sistem formal yang sangat terstruktur dari 1-4 tahun lamanya. Biasanya melibatkan sebagian waktu pelatihan di perusahaan dan sebagian waktu di sekolah atau pendidikan lanjutan di bawah tanggung jawab bersama pengusaha dan lembaga pendidikan. Eichhorst et. al (2012) mengatakan sistem pendidikan kejuruan di Jerman bahwa:

The setup of the dual apprenticeship is generally standardized to a two to four year duration, during which the trainee participates in training within the firm and a vocational school, in an alternating matter. While the school-based training provides both general and occupation-specific knowledge, training within the firm contains firm-specific elements.

Dimana dijelaskan bahwa sistem VET di Jerman dalam menerapkan pendidikan sistem ganda (PSG) umumnya menggunakan durasi dua sampai empat tahun, di mana peserta pelatihan berpartisipasi dalam pelatihan dalam perusahaan dan sekolah kejuruan secara bergantian. Di Jerman, peserta pelatihan dimagangkan secara formal di perusahaan atau di pusat-pusat pelatihan yang sesuai bidangnya selama 3-4 hari seminggu dan 1-2 hari seminggu di sekolah untuk materi teoritis dan keterampilan kerja tertentu selama 3 tahun. Perusahaan-perusahaan memainkan peran yang dominan dalam membantu mengembangkan konten pelatihan dan evaluasi.

Sistem VET di Latvia juga menerapkan pola 4 tahun, sebagaimana dijelaskan Departemen Pendidikan dan Sains Republik Latvia dalam evaluasi dirinya (2011:29-30) bahwa:

There are 3 sorts of VET; 1). *Basic vocational education and training of 1 to 2 years' duration: imparting of simple occupational qualification for school leavers who have failed to achieve a school leaving certificate from the 9 years of basic education at the general school. This pathway also enables them to catch up by obtaining their school leaving certificate.* 2) *Vocational education and training in a simple vocational school, of 2 to 3 years' duration: imparting of theoretical and practical knowledge/skills for the pursuit of an occupation. The curricula also contain general educational elements. Completion of training does not confer right of entry to higher education.* Dan 3) *Vocational education and training in a further vocational school, of 4 years' duration: imparting of higher-level occupational knowledge, contains extensive general educational component, passing the course confers right of entry to the Latvian higher education system.*

Sistem VET di Latvia di bagi menjadi 3 jenis, pertama, Pendidikan dasar kejuruan dan pelatihan durasi waktu 1 sampai 2 tahun: menanamkan kualifikasi pekerjaan sederhana bagi lulusan sekolah yang telah gagal mendapatkan sertifikat dari pendidikan dasar 9 tahun, kedua, Pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan durasi 2-3 tahun, dimana menanamkan teoritis dan praktis pengetahuan dan keterampilan untuk mengejar suatu pekerjaan. Kurikulum ini juga

mengandung unsur pendidikan umum. Selesai pelatihan tidak memberi hak masuk ke pendidikan tinggi, *ketiga*, Pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan durasi 4 tahun dimana menanamkan tingkat yang lebih tinggi pengetahuan kerja, mengandung komponen pendidikan umum yang luas dan lulusan berhak mendapatkan sertifikat untuk masuk ke sistem pendidikan tinggi.

Keberadaan SMK 4 tahun dalam pelaksanaannya menerapkan tahun pertama sampai tahun ketiga dialokasi waktu untuk penerimaan materi pelajaran di sekolah. Dan tahun keempat, SMK 4 tahun mengalokasikan waktu untuk materi pelajaran di DU-DI yang disebut praktek kerja industri (prakerin) selama 7-8 bulan dan pelaksanaan uji kompetensi. Sementara pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk SMK 4 tahun dilaksanakan pada tahun ketiga. Sedangkan SMK 3 tahun, dialokasi waktu untuk prakerin selama 3-4 bulan (paling lambat awal tahun ke-3) dan pelaksanaan UN serta pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan pada tahun ketiga. Sehingga SMK 4 tahun di nilai efektif untuk menghasilkan tenaga kerja yang handal. Lulusan SMK 4 tahun semakin siap dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental di DU-DI. Sebenarnya SMK 3 tahun sudah cukup untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, termasuk prakerin selama kurang lebih 1 semester. Namun belum mematangkan lulusan, terutama sikap dewasa dan tangguh dalam dunia kerja.

BAB 4

KARAKTERISTIK SISWA, GURU, & KEPALA SEKOLAH (*INPUT*)



A. Karakteristik Status Sosial-Ekonomi Siswa

Berbagai literatur dan penelitian tentang keefektifan sekolah, dimana tujuan akhirnya sekolah di ukur dari tingkat prestasi siswa. Prestasi siswa sangat ditentukan oleh karakteristik siswa sebagai *input* yang mendaftar dan masuk pada sebuah sekolah, dan proses (*process*) yang terjadi selama kurun waktu di sekolah. Tuntutan paradigma pendidikan di era globalisasi ini, di mulai dari peningkatan pendaftaran masuk sekolah ke peningkatan mutu pendidikan, sehingga keefektifan sekolah dalam mengelola karakteristik siswa menjadi tanggung jawab sepenuh tanpa melihat latar belakang sosial-ekonominya.

Secara matematis bahwa siswa dari latar belakang keluarga sosial-ekonomi yang baik, akan lebih mudah melakukan proses untuk melahirkan siswa berprestasi, dibandingkan dengan siswa yang berlatar belakang keluarga sosial-ekonomi yang kurang baik. Sekolah yang menganut sistem sosial dan terbuka, maka harus melakukan

identifikasi sosial-ekonomi siswanya sebagai *input* untuk dilakukan perbaikan proses pendidikan dalam mencapai tujuan sekolah

Keefektifan sekolah memiliki tujuan utama adalah meningkatkan prestasi belajar siswa secara individu maupun secara keseluruhan dalam sistem sekolah. Berbagai regulasi dalam sistem pendidikan di Indonesia mengungkapkan tentang peserta didik atau siswa. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 4 berbunyi “peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap prestasi siswa yang berkaitan dengan karakteristik sosial-ekonomi siswa, seperti Windarto (2013:115) memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan siswa, informasi pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan pemenuhan keluarga dengan minat siswa SMP dalam melanjutkan sekolah ke SMK. Rowe (2007:768) mengemukakan bahwa “*ethnic and family socio-economic background factors constituted the dominant determinants of student’s educational outcomes*”.

Status sosial ekonomi keluarga merupakan faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi minat anak. Semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang, maka semakin selektif dalam memilih jenis pendidikan. Penelitian Coleman yang dirilis pada 1966, kajian Hauser, Sewell dan Alwin 1976 (dalam Scheerens, 2000:36-37), mengungkapkan bahwa:

Three clusters of school characteristics were measured: (1) teacher characteristics; (2) material facilities and curriculum; and (3) characteristics of the groups or classes in which the pupils were placed... the greater part of this 10 per cent variance was due to the third cluster that was operationalized as the average background characteristics of pupils, which means that again the socio-economic and ethnic origin-now defined at the level of the school-played a central role.

Sehingga karakteristik siswa terhadap keefektifan sekolah sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Penerimaan atau rekrutmen siswa baru adalah merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, penerimaan siswa baru tersebut melalui seleksi yang ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon siswa baru. Rekrutmen siswa baru pada SMK baik model SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun berdasarkan kemampuan dasar umum (kecerdasan), bakat, minat dan kondisi fisik serta sosial budaya serta minat karir. Badan PSDMP dan PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013:3) dalam pedoman peminatan peserta didik menyatakan bahwa :

Fenomena dalam melanjutkan atau memilih program studi menunjukkan bahwa peserta didik tamatan SMP/MTs yang memasuki SMA/MA dan SMK, dan tamatan SMA/MA dan SMK yang memasuki perguruan tinggi belum semuanya didasarkan atas peminatan peserta didik yang didukung oleh potensi dan kondisi

diri secara memadai sebagai modal pengembangan potensi secara optimal, seperti kemampuan dasar umum (kecerdasan), bakat, minat dan kondisi fisik serta sosial budaya serta minat karir mereka.

Banyak faktor yang mempengaruhi keinginan siswa untuk melanjutkan ke SMK atau SMA, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang akan mempengaruhi siswa untuk memilih melanjutkan ke SMA atau SMK adalah minat mereka. Menurut Slameto (2003:180) bahwa “minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh”. Yani dalam Rahmadani (2011:20) menjelaskan bahwa, ”status sosial ekonomi orang tua, yakni keluarga yang erat hubungannya dengan individu secara langsung memiliki pengaruh tertentu terhadap minat atau arahan pilihan pendidikan anak-anaknya”. Semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang maka semakin selektif dalam memilih jenis pendidikan. Jadi faktor sosial ekonomi turut menentukan jenis pendidikan yang ditempuh oleh seseorang.

Berbagai regulasi yang memberikan jaminan untuk mendapatkan pendidikan tanpa harus melihat dari status sosial ekonomi siswa, seperti hasil Amandemen UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional, pasal 31 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa, “(1) mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) mengharuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Sesuai dengan pasal 31 di atas jelaslah bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan tanpa

memandang status sosialnya, dan negara menjamin setiap warga negaranya dapat memperoleh minimal pendidikan dasar.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 49 yang berbunyi: "Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan." Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa "Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."

Siswa dalam memilih jenis pendidikan seharusnya berdasarkan minat dan bakat yang dimilikinya serta kemampuan sosial ekonomi orang tuanya. Rony Windarto (2013: 106) menyatakan bahwa :

Keragaman latar belakang ekonomi orang tua tersebut dapat berpengaruh pula pada kemampuan membiayai kepada anak-anaknya, sehingga keadaan sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan anak. Keluarga bertanggung jawab menyediakan dana untuk kebutuhan pendidikan anak. Keluarga (orang tua) yang keadaan sosial ekonominya tinggi tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak, berbeda dengan orang tua yang keadaan sosial ekonominya rendah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 53A ayat 3 mengatakan bahwa “satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi”.

Keefektifan sekolah diukur dari prestasi belajar siswanya, dan beberapa yang mempengaruhi prestasi belajar adalah minat, bakat dan status sosial-ekonomi keluarga. Minat, bakat dan status sosial-ekonomi keluarga, perlu ditelaah lebih lanjut karena berdampak pada keefektifan sekolah untuk mencapai tujuannya. SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun merupakan sistem sekolah yang terlepas dari *input* siswa yang memiliki latar belakang minat, bakat dan status sosial-ekonomi yang beragam.

B. Kualifikasi Pendidikan, Pengalaman Pelatihan dan Masa Kerja Guru

Guru atau tenaga pendidik merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan di semua tingkatan, guru diharapkan mampu menjadi fasilitator, motivator dan dinamisator dalam proses belajar siswa. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Maka dari itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dalam dunia pendidikan.

Komponen penting dalam sistem pendidikan adalah guru dan instruktur di tingkat kelas dan guru diharapkan mampu menjadi fasilitator, motivator dan dinamisator dalam proses belajar siswa. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa “pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”.

Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Pengelolaan pada lampiran Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan *point* 7 mengatakan bahwa “guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia berkualitas dan mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum”. Lebih lanjut pada lampiran Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan *point* 9 mengatakan bahwa “pelatih/instruktur

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan”.

Guru SMK tidak hanya kompetensi yang dibutuhkan pada dunia pendidikan saja, tetapi sangat dibutuhkan kompetensi di DU-DI. Dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, perlu adanya metode pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru. Dengan demikian proses belajar mengajar akan berjalan seiring dengan pengembangan aspek-aspek belajar siswa yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor.

Perekrutan guru bagi pendidikan kejuruan semestinya berbeda dengan perekrutan guru pada pendidikan umum lainnya. Perencanaan akan kebutuhan guru harus berbeda dengan perhitungan kebutuhan pada pendidikan kejuruan baik SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun dengan pendidikan umum seperti kebutuhan guru SMA. Sesuai dengan Gordon (2004:149) menyatakan bahwa ”rekrutmen calon guru merupakan proses pencarian calon tenaga guru yang potensial sesuai tujuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah”. Perekrutan guru telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya bagi sekolah negeri. Namun perekrutan guru bagi sekolah-sekolah swasta, dilakukan oleh yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Namun demikian tetap menganut prinsip-prinsip aturan yang berlaku secara nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa, ”Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah”.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi merubah perilaku proses belajar mengajar dan pengaplikasian perangkat pembelajaran. Surya Darma dkk (2013:180) mencatat realita bahwa pada saat ini telah terjadi perubahan-perubahan yaitu : *”(1) changes in the work place; (2) advances in digital technologies; (3) global connections; and (4) changer in our understanding of learning”*, bahwa akibat kemajuan teknologi digital saat ini telah terjadi perubahan di tempat kerja, dan perubahan pemahaman siswa dalam belajar.

Tantangan guru SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun dapat dianalisis dari arah regulasi pemerintah terhadap sistem pendidikan nasional dan arah perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi serta teknologi informasi yang memberikan konsekuensi pada perkembangan SMK, Guru SMK dan peserta didik SMK. Dengan arak kebijakan tersebut, dapat di ringkas yang telah diungkapkan Surya Darma dkk (2013:180-121) bahwa tantangan-tantangan yang akan dihadapi guru SMK, yaitu:

1) Tantangan guru SMK dalam menyiapkan tenaga kerja

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di dunia kerja berjalan lebih cepat daripada perkembangan IPTEK yang terjadi di SMK. Hal ini menyebabkan kompetensi keahlian yang diajarkan guru SMK sering mengalami kesenjangan dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga daya serap lulusan SMK di dunia kerja masih relatif rendah. Laju perkembangan teknologi setiap bidang keahlian SMK berbeda, namun semua guru SMK perlu mengantisipasinya. Untuk menyiapkan lulusan

yang siap kerja, guru SMK dituntut memiliki kompetensi yang terus menerus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan kompetensi lapangan kerja.

2) Tantangan Guru SMK dalam Kebijakan Politik

Departemen pendidikan nasional memiliki renstra pembangunan pendidikan periode 2005-2025 yang dibagi menjadi empat tema, yaitu: (1) peningkatan kapasitas dan modernisasi yang dilaksanakan pada tahun 2005-2009; (2) penguatan pelayanan dilaksanakan pada tahun 2010-2014; (3) daya saing regional dilaksanakan pada tahun 2015-2019; dan (4) daya saing internasional dilaksanakan pada tahun 2020-2020. Untuk menerapkan renstra tersebut, maka guru SMK harus meningkatkan secara kontinu pada kemampuan pelayanan pendidikan agar lulusan dapat memiliki daya saing baik nasional maupun internasional. Dalam menjawab tantang ini, guru SMK dituntut agar selalu memperbarui dan meningkatkan kompetensi yang ditekuninya. Di masa depan, SMK diharapkan telah memiliki kemitraan dengan DU-DI.

Dalam rangka meningkatkan daya serap lulusan dan daya saing SMK, Direktorat Pembinaan SMK memiliki target yang akan dicapai untuk meningkatkan keterserapan lulusan dan daya saing SMK pada tahun 2014 antara lain; (1) 70% SMK memiliki unit pembelajaran usaha (*teaching industry*); (2) semua SMK memiliki industri pasangan yang relevan dalam rangka pengembangan kewirausahaan. Dalam roadmap pengembangan SMK 2010-2014 dalam merintis *teaching industry* tersebut, SMK dan industri dapat melakukan kerjasama dalam membentuk pemenuhan peralatan murah, seperti :

- a) Bekerjasama dengan mitra industri lokal/internasional untuk penyediaan *sparepart* peralatan SMK.
- b) Bekerjasama dengan mitra industri lokal/internasional untuk merakit peralatan-peralatan SMK.
- c) Mengembangkan *teaching factory/industry* di SMK.
- d) Mengarahkan praktek siswa kepada pembuatan suku cadang peralatan SMK sesuai dengan kompetensi keahlian siswa yang relevan.

Supaya target direktorat PSMK dapat tercapai maka diperlukan dukungan guru SMK yang mampu mengembangkan *teaching factory/teaching industry*. Perintisan *teaching factory/ teaching industry* memerlukan kerjasama dengan DU-DI yang sudah maju supaya terjadi pengimbasan pada pengelolaan usaha dari DU-DI ke SMK.

3) Tantangan Guru SMK dalam Pembangunan Ekonomi

Tantangan guru SMK dalam pembangunan ekonomi di masa depan dapat diprediksi dari arah kebijakan pembangunan ekonomi makro. SMK memiliki peranan yang signifikan dalam mengembangkan SDM dalam mengelola potensi SDA di tiap-tiap koridor wilayah pembangunan. Pengelolaan SDA membutuhkan teknologi dan tenaga ahli yang mampu menggunakan teknologi tersebut. Peran SMK dalam pembangunan ekonomi adalah menghasilkan SDM atau lulusan yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan potensi ekonomi di wilayah masing-masing.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi, SMK dan guru SMK harus membekali para siswa dengan kemampuan kewirausahaan agar lulusan tidak tergantung pada peluang kerja di sektor industri. Agar SMK mampu menyiapkan lulusan menjadi calon-

calon wirausaha, maka SMK memerlukan dukungan pemerintah untuk mengembangkan unit produksi, *teaching factory/ teaching industry* atau *business center* sebagai sarana belajar usaha bagi para siswa.

4) Tantangan Guru SMK dalam proses pembelajaran

Guru menghadapi banyak tantangan dalam proses pembelajaran. Tantangan tersebut berasal dari perkembangan teknologi digital di bidang komunikasi dan informasi (TIK) yang memberikan dampak pada teknologi pembelajaran dan perubahan karakter peserta didik dalam belajar.

5) Perubahan Paradigma dalam Pembelajaran

Melihat perkembangan TIK yang begitu cepat, maka pendidikanpun mengalami pergeseran paradigma. Beberapa paradigma pendidikan yang mengalami pergeseran antara lain: kurikulum, proses pembelajaran dan lingkungan belajar. Kurikulum mengalami pergeseran paradigma yaitu dari kurikulum tradisional yang mengedepankan pada isi menjadi kurikulum yang menyeimbangkan proses dan isi, dahulu isi disetujui saja tanpa pertimbangan, saat ini mulai dipikirkan bagaimana siswa nantinya akan belajar.

Pergeseran paradigma yang terjadi dari pembelajaran yang dapat berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa yang tadinya pasif menjadi lebih aktif. Perubahan gaya belajar siswa yang semakin kritis, menyebabkan metode pembelajaran yang tradisional yang hanya berpusat pada guru seperti ceramah sudah tidak menarik lagi. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang guru harus memperbaiki gaya mengajar, menggunakan berbagai strategi dan

sumber belajar dan lebih banyak melibatkan siswa dalam kegiatan belajar.

Lingkungan belajar mengalami pergeseran paradigma dari lingkungan belajar yang kompetitif menjadi kooperatif. Sistem manajemen juga mengalami perubahan dari manajemen yang diatur oleh pusat menjadi manajemen berbasis sekolah. Lingkungan belajar dikondisikan untuk memberdayakan siswa dalam belajar bukan untuk mengawasi siswa dalam belajar.

Berdasarkan berbagai tantangan yang harus dihadapi guru di SMK, maka keberhasilan pendidikan kejuruan baik SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun dapat diukur pada tingkat keterserapan lulusan pada DU-DI dan membuka usaha mandiri. Keterserapan lulusan pada dunia kerja dan melakukan usaha mandiri, sangat ditentukan oleh kompetensi lulusan. Dan kompetensi lulusan baik SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun dapat terwujud, jika guru dapat mengatasi tantangan dengan memiliki kompetensi yang dibutuhkan lulusan. Sehingga siswa dibekali berbagai keterampilan yang dibutuhkan masyarakat pengguna, sehingga dapat bersaing pada pasar global. Untuk mempersiapkan lulusan SMK yang siap bersaing dunia kerja atau usaha mandiri, maka guru SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun dituntut memiliki kompetensi yang selalu mengikuti perkembangan berdasarkan tingkat kebutuhan kompetensi dunia kerja.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah badan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mengeluarkan sertifikasi kompetensi kerja yang diakui secara nasional oleh pengguna tenaga kerja. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji

kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional. Sertifikat kompetensi kerja digunakan oleh pemiliknya untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan kompetensi spesifik yang tertulis pada sertifikat tersebut tanpa melalui tes masuk pada bidang keahliannya.

Penerapan standar kompetensi dimaksudkan agar guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan fungsinya memiliki pola dan skema yang jelas. Lima tipe karakteristik kompetensi yang disebutkan oleh Spencer & Spencer (1993) adalah: *pertama* motivasi, yaitu sesuatu yang mendorong seseorang secara konsisten berpikir dan berkeinginan untuk berbuat, *kedua* kecenderungan, yaitu karakteristik secara fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi, *ketiga* konsep diri (*self-concept*), yaitu sikap, nilai dan gambaran diri yang dimiliki oleh seseorang, *keempat* pengetahuan, yaitu informasi tentang area isi tertentu (*specific content areas*) yang dimiliki seseorang dan *kelima* keterampilan (*skill*), yaitu kemampuan seseorang untuk menampilkan suatu unjuk kerja dalam tugas secara mental/kognitif dan atau secara fisik.

Stronge dalam Darma dkk (2013:37-45) menyatakan bahwa elemen kompetensi guru terdiri dari *prequisites of effective teaching* (setiap guru memerlukan persyaratan untuk bisa mengajar secara efektif), *teacher as person* (guru harus memiliki kompetensi kepribadian), *classroom management and organization*, (guru harus memiliki kompetensi dalam manajemen dan organisasi kelas), *organization for instruction* (guru yang efektif harus memiliki kompetensi dalam mengorganisasikan pembelajaran), *implementing Instruction* (kelas yang efektif dapat dirumuskan secara sederhana),

dan *monitoring student progress and potential* (guru yang efektif harus memiliki kompetensi untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan belajar murid)

Kompetensi guru SMK dalam buku Mertinet, Gauthier and Raymon yang berjudul *Teacher Training in Vocational Education, Orientation Professional Competence (2000)* dalam Surya Darma dkk (2013:46) menyatakan bahwa kompetensi guru SMK ada 12 butir yaitu:

- a) *The act as a professional inheritor, critic and interpreter of knowlegde or culture when teaching students*, yaitu bertindak sebagai seorang pewaris profesional, kritikus, dan ahli pengetahuan atau budaya saat mengajarkan siswa.
- b) *To communicate clearly in the language of instruction, both orally and writing , using correct grammar, in various contexts related to teahing*, yaitu berkomunikasi menggunakan bahasa secara jelas dalam menyampaikan pengajaran, baik secara lisan maupun tertulis, menggunakan tata bahasa yang benar, dalam berbagai konteks yang berkaitan dengan pengajaran.
- c) *To develop teaching/learning situations that are appropriate to the students concerned and the subject content with a view to developing the competencies targeted in the programs of study*, yaitu mengembangkan situasi belajar mengajar yang sesuai dengan siswa yang bersangkutan dan isi pokok yang sesuai dengan tujuan, guna mengembangkan kompetensi yang ditargetkan dalam program studi.
- d) *To pilot teaching/learning situations that are appropriate to the students concerned and the subject content with a view to developing the competencies targeted in the programs of study*,

yaitu mengarahkan situasi belajar mengajar yang sesuai dengan siswa yang bersangkutan dan isi pokok yang sesuai dengan tujuan, guna mengembangkan kompetensi yang ditargetkan dalam program studi.

- e) *To evaluate student progress in learning subject content and mastering the related competencies*, yaitu mengevaluasi kemajuan siswa dalam mempelajari isi pelajaran dan menguasai kompetensi yang sesuai dengan yang diajarkan.
- f) *To plan, organize dan supervise a class in such a way as to promote student learning and social development*, yaitu merencanakan, mengorganisasikan dan mengawasi kelas sedemikian rupa yang berguna untuk mendukung pembelajaran siswa dan pengembangan kelas.
- g) *To adapt his or her teaching to the need and characteristics of student with learning disabilities, social, mala-djustment or handicaps*, yaitu menyesuaikan pengajaran dan kebutuhan dan karakteristik siswa yang berhubungan dengan ketidakmampuan belajar, ketidakmampuan menyesuaikan diri ataupun kegagalan/putus.
- h) *To intergrate information and communications technologies (ICT) in the preparation and delivery of teaching/learning activities and for instructional management*, yaitu mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam persiapan dan pentransferan kegiatan belajar/mengajar dan sebagai pembelajaran manajemen dan tujuan pengembangan secara professional.

- i) *To cooperate with school staff, parents, partner in the community and students in pursuing the educational objectives of the school, yaitu bersama-sama dengan staf sekolah, orang tua, masyarakat dan siswa dalam mengejar tujuan pendidikan sekolah.*
- j) *To cooperate with members of the teaching team in carrying out tasks involving the development and evaluation of the competencies targeted in the programs of study, taking into account the student concerned, yaitu bersama-sama dengan anggota tim pengajar melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan pengembangan dan evaluasi kompetensi yang ditargetkan dalam program studi, dengan mempertimbangkan siswa yang bersangkutan.*
- k) *To engage in professional development individually and with others, yaitu terlibat dalam pengembangan profesional secara individu maupun dengan orang lain.*
- l) *To demonstrate ethical and responsible professional behavior in the performance of this or her duties, yaitu menunjukkan perilaku profesional secara etis dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.*

Mulyasa (2007:24) menyatakan bahwa "kompetensi guru di Indonesia adalah kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan". Undang-undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa "kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas profesionalan".

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 3 menyatakan *”kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesioanal yang diperoleh melalui pendidikan profesi”*. Untuk menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat akan lulusan SMK, maka keefektifan SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun sangat ditunjang oleh profil guru yang minimal memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja.

C. Pembinaan dan Mengembangkan Keprofesionalan Guru

Robinson, et al. dalam Hallinger dan Wang, (2015:34) menemukan bahwa dukungan dan partisipasi kepala sekolah dalam pengembangan keprofesionalan guru dan staf menghasilkan efek terbesar pada peningkatan prestasi belajar siswa. Kepala sekolah dalam mendukung guru untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajarannya dapat melakukan beberapa hal, yaitu mengatur, menyediakan, atau menginformasikan peluang yang relevan untuk pengembangan keprofesionalan guru dan stafnya. Kepala sekolah dapat mendorong pengembangan keprofesionalan guru dan stafnya berdasarkan tujuan sekolah (Day, et al 2010; Hallinger and Heck, 1996a, 2010, 2011a, b; Heck and Hallinger 2009, 2011; Kruger, et al, 2007; Joyce and Showers, 2002; Little, 1982; Louis, et al, 2010; Robinson, et al. 2008; Showers, 1985).

Dharma, dkk (2013:237) pentingnya pengembangan guru dalam menunjang peranannya, sebab pengembangan profesional guru perlu dilakukan sebagai upaya mendorong agar terjadi kerjasama dan dialog

profesional antar guru, serta dapat membantu guru dalam menetapkan dan mengembangkan tujuan pendidikan dan pembelajaran, memberi kesempatan kepada guru untuk melakukan perencanaan secara kolaboratif, melakukan eksperimen-eksperimen serta mau bersikap kritis terhadap pengajarannya sendiri. Konteks pengembangan profesioanl guru dapat dilihat dari berbagai hal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 47 berbunyi:

- (3) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan/atau olah raga.
- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).

Guru SMK bukan hanya dituntut pada penguasaan kompetensi pedagogis dan profesional saja, tetapi juga dituntut pada penguasaan kompetensi di DU-DI. Pelaksanaan kurikulum diperlukan adanya

penguasaan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dari materi pembelajaran pada tiap kompetensi yang diajarkan. Proses pembelajaran dapat berjalan seiring dengan pengembangan aspek-aspek belajar siswa yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor. Pengembangan profesional bagi guru SMK harus terus didorong seiring dengan permintaan pasar kerja yang membutuhkan tenaga terampil dan kompeten sesuai bidangnya. Sehingga guru berperan penting dalam menghasilkan lulusan terampil dan kompeten dibidangnya, maka guru harus lebih dahulu memiliki kompetensi pedagogik, afektif dan keterampilan pada bidang yang diajarkan.

Jenis-jenis pelatihan yang dapat dilakukan oleh organisasi pendidikan antara lain; kursus pelatihan guru (*in-service course for teacher*), seminar, *on the job training*, *off the job training*, *vestibule training*, kursus penyegaran (*refresher courses*), pelatihan kepekaan (*sensitivity training*), dan pelatihan tambahan (*supplementary training*). Untuk melaksanakan tugas kepemimpinan pembelajaran yang baik, maka harus memiliki kompetensi. Salah satu acuan untuk memenuhi kompetensi, mengacu pada suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan (Anwar, 2013, Wukir, 2013)

Pengembangan profesional bagi guru SMK harus terus didorong seiring dengan permintaan pasar kerja yang membutuhkan tenaga terampil dan kompeten dibidangnya. Melahirkan lulusan terampil dan kompeten dibidangnya, maka guru harus lebih dahulu memiliki kompetensi pedagogik, afektif dan keterampilan pada bidang

yang diajarkan. Untuk itu, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pengembangan profesional. Dampak yang dapat diperoleh dari pengembangan profesional guru adalah pengembangan proses belajar mengajar di kelas.

Dharma, dkk (2013:244-251) mengklafikasi jenis-jenis pengembangan profesi guru SMK yaitu pelatihan, magang mengajar pada guru senior, terlibat dalam asosiasi profesi, kalaborasi kolegial, penelitian tindakan, mengikuti pendidikan lanjut, berpartisipasi pada kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti workshop, seminar, konferensi dan kursus, studi mandiri, berpartisipasi pada peran-peran baru, pengembangan keterampilan, kerja proyek, dan mengikuti program induksi guru pemula.

Tantangan guru SMK baik model SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun dapat dianalisis dari arah regulasi pemerintah terhadap sistem pendidikan nasional dan arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi serta teknologi informasi yang memberikan konsekuensi pada perkembangan SMK, Guru SMK dan peserta didik SMK. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka dapat menimbulkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi guru SMK, Surya Darma dkk (2013:182) mengungkapkan tantangan-tantangan guru SMK yaitu "menyiapkan tenaga kerja yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghadapi pembangunan politik dan ekonomi, pengembangan teknologi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di masa depan; dan melakukan uji kompetensi lulusan SMK".

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pasar kerja yang begitu pesat, namun perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi di SMK belum mampu mengikuti tuntutan dunia kerja. Maka guru SMK senantiasa mendekatkan siswa pada pembelajaran berbasis perkembangan DU-DI. Sehingga Guru SMK harus mampu mengikuti percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menghasilkan lulusan yang kompetitif di pangsa pasar kerja nasional maupun internasional. Sehingga guru di SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun dituntut memiliki kompetensi yang selalu mengikuti perkembangan berdasarkan tingkat kebutuhan kompetensi dunia kerja.

Pergeseran paradigma yang terjadi dari pembelajaran yang dapat berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa yang tadinya pasif menjadi lebih aktif. Perubahan gaya belajar siswa yang semakin kritis, menyebabkan metode pembelajaran yang tradisional yang hanya berpusat pada guru seperti ceramah sudah tidak menarik lagi. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang guru harus memperbaiki gaya mengajar, menggunakan berbagai strategi dan sumber belajar dan lebih banyak melibatkan siswa dalam kegiatan belajar.

Sosok guru yang mampu mengemban tugas dengan baik sesuai dengan motto oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*. Untuk dapat melaksanakan fungsi pertama, berarti guru haruslah berkepribadian yang utuh dengan kemampuan akademik dan profesional yang andal. Untuk dapat melaksanakan fungsi kedua dibutuhkan guru yang memaham dan menyayangi peserta didik. Sedangkan untuk dapat melaksanakan fungsi yang ketiga, guru harus terus memantau terus proses belajar peserta didik dan mendorong semangat belajar peserta didiknya.

D. Kriteria Kepala Sekolah di SMK 3 Tahun dan SMK 4 Tahun

Kepala sekolah harus memiliki kepemimpinan sekolah yang kuat, mendistribusikan tanggung jawab, memilih pekerjaan yang benar, menerapkan skala prioritas dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, bahwa “pemimpin harus memiliki integritas kepribadian dan keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah (BSNP, 2007:2).

Kepala sekolah berfokus pada pembelajaran, mengomunikasikan pentingnya pembelajaran kepada siswa dan meluangkan waktu untuk mengamati pembelajaran serta berinteraksi dengan guru. Keefektifan kepala sekolah di SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun harus memenuhi kualifikasi minimal standar kepala sekolah dan syarat penugasan guru sebagai kepala sekolah. Kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan tersebut menjadi modal utama keefektifan kepala sekolah di SMK 3 tahun dan kepala SMK 4 dalam meningkatkan prestasi siswa dan mewujudkan keefektifan sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa “pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah/madrasah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah/madrasah”. Pasal 11 ayat 1-2 menyatakan bahwa “(1) pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi

pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial; (2) pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif”.

Kualifikasi pendidikan kepala sekolah sebagai syarat untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Persyaratan menjadi kepala sekolah tentu tidak dapat dilihat dari aspek administratif tetapi perlu diperhatikan dan dilengkapi dengan hasil monitoring para supervisor dan ahli pendidikan tentang kelayakannya untuk menduduki jabatan kepala sekolah disamping dukungan para guru dan masyarakat (Sagala, 2013:89).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pasal 2 ayat 3 yang berbunyi “persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi: (1) berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah; dan (2) memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal”.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2010 pasal 3 ayat 1 berbunyi “penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah”. Pasal 5 ayat 3 berbunyi “seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan”. Pasal 6 ayat 1 berbunyi “guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah pada lembaga yang terakreditasi”. Pasal 7 ayat 1-2 menyatakan bahwa:

(1) pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial; (2) pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.

Keefektifan kepala sekolah pada SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal, memiliki pengalaman mengajar, pengalaman mengelola serta pengalaman pendidikan dan pelatihan. Pengalaman mengajar, pengalaman mengelola dan pengalaman pendidikan dan pelatihan menjadi kunci dalam menunjang keefektifan kepala sekolah di SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun. Pengalaman kepala sekolah terdiri dari karakteristik pribadi diantaranya jenis kelamin, lama mengajar dan pengalaman administrasi, keikutsertaan pada pelatihan, dan sifat-sifat pribadi lainnya (misalnya, kecerdasan emosional).

KEPEMIMPINAN DAN PROSES PEMBELAJARAN (*PROCESS*)



A. Kepemimpinan Pembelajaran di SMK 3 Tahun dan SMK 4 Tahun

Karakteristik keefektifan sekolah terdiri dari kepemimpinan pembelajaran (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi dan guru) sebagai pemimpin pembelajaran pada tingkatan masing-masing, fokus pada pembelajaran, memberikan iklim tertib dan aman, memiliki harapan yang tinggi dari setiap siswa untuk berprestasi, dan prestasi siswa adalah dasar untuk mengevaluasi sekolah.

Marzano, et al. (2005:4) mengungkapkan bahwa “dengan pentingnya persepsi kepemimpinan, maka kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang efektif dianggap menjadi prasyarat yang diperlukan untuk keefektifan sekolah. Lebih lanjut memberikan hubungan kepemimpinan dan keefektifan sekolah bahwa *“leadership is vital to the effectiveness of a school. In fact, for centuries people have assumed that leadership is critical to the success of any institution or endeavour”* (Marzano, et.al., 2005:4). Kepemimpinan pembelajaran menentukan keefektifan sekolah, bahkan selama berabad-abad orang telah mengasumsikan bahwa kepemimpinan adalah kritis terhadap keberhasilan setiap lembaga atau usaha.

Kepemimpinan pembelajaran merupakan aspek penting dari kepemimpinan sekolah. Hasil karya pemimpin pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa menerima pengajaran yang berkualitas tinggi setiap hari sehingga mengharuskan pemimpin pembelajaran mengarahkan pada peningkatan kualitas pengajaran dan peningkatan belajar siswa.

Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional (2010:1) memberikan definisi bahwa kepemimpinan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi dan guru yang memfokuskan kepemimpinan pembelajaran menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik dari pada pemimpin pembelajaran yang kurang memfokuskan pada kepemimpinan pembelajaran.

Badan PSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014:40) mendefinisikan bahwa “kepemimpinan pembelajaran merupakan tindakan kepala sekolah yang mengarah pada terciptanya iklim sekolah yang mampu mendorong terjadinya peningkatan mutu pengelolaan internal sekolah sehingga memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran yang merangsang para siswa untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi”. Elmore (dalam Yukl, 2010:21-22) mengungkapkan promosi kepemimpinan pembelajaran yang menekankan pentingnya memahami praktik yang efektif dalam kurikulum, pengajaran, penilaian dan kemampuan untuk bekerja dengan guru pada masalah sehari-hari.

Yukl (2010:290-291) memberikan pandangan tentang keefektifan kepemimpinan yaitu efektivitas pemimpin berdasarkan konsekuensi dari tindakan pemimpin dan komponen lainnya dalam

organisasi ... ukuran yang paling banyak digunakan untuk mengukur efektivitas. Ukuran subjektifnya adalah tingkat efektivitasnya yang dihasilkan oleh pemimpin tertinggi, para pekerja atau bawahan.

Keefektifan kepemimpinan pembelajaran antara lain: (1) kepala sekolah mensosialisasikan dan menanamkan isi dan makna visi sekolahnya dengan baik; (2) kepala sekolah melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sekolah (manajemen partisipatif); (3) kepala sekolah memberikan dukungan terhadap pembelajaran, misalnya dia mendukung bahwa pengajaran yang memfokuskan pada kepentingan belajar siswa harus menjadi prioritas; (4) kepala sekolah melakukan pemantauan terhadap proses belajar mengajar sehingga memahami lebih mendalam dan menyadari apa yang sedang berlangsung di dalam sekolah; dan (5) kepala sekolah berperan sebagai fasilitator sehingga dengan berbagai cara dia dapat mengetahui kesulitan pembelajaran dan dapat membantu guru dalam mengatasi kesulitan belajar tersebut (Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:8)

Kepemimpinan pembelajaran adalah kepemimpinan yang memfokuskan pada pembelajaran yang meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen (penilaian hasil belajar), penilaian serta pengembangan guru, layanan prima dalam pembelajaran, dan pembangunan komunitas belajar di sekolah. Kurikulum meliputi kegiatan perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah; pengembangan struktur dan muatan kurikulum; dan pembuatan kalender. Proses belajar mengajar meliputi perangkat pembelajaran dan fasilitas belajar lainnya, pengelolaan kelas, dan pemotivasian siswa. Evaluasi hasil

belajar meliputi aspek yang di evaluasi, metode evaluasi, dan pelaporan.

Butir-butir penting kepemimpinan pembelajaran menyarankan bahwa kepemimpinan pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh; (1) figur kepala sekolah yang mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai pemimpin pembelajaran; (2) kultur pembelajaran yang dikembangkan melalui pembangunan komunitas belajar di sekolah; dan (3) sistem (struktur) yang utuh dan benar. Perilaku kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, guru, dan karyawan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas pembelajaran di sekolah (Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:20).

Pemimpin pembelajaran harus memiliki 12 kompetensi, yaitu: (1) mengartikulasikan pentingnya visi, misi, dan tujuan sekolah yang ditekankan pada pembelajaran; (2) mengarahkan dan membimbing pengembangan kurikulum; (3) membimbing pengembangan dan perbaikan proses belajar mengajar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pengelolaan kelas; (4) mengevaluasi kinerja guru dan mengembangkannya; (5) membangun komunitas pembelajaran; (6) menerapkan kepemimpinan visioner dan situasional; (6) melayani kegiatan siswa; (8) melakukan perbaikan secara terus menerus; (8) menerapkan karakteristik pemimpin pembelajaran yang efektif; (10) memotivasi, mempengaruhi, dan mendukung prakarsa, kreativitas, inovasi, dan inisiasi pengembangan pembelajaran; (11) membangun *teamwork* yang kompak; dan (12) menginspirasi dan memberi contoh (Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:38).

Secara empiris dan terverifikasi bahwa yang berdampak paling kuat pada hasil belajar siswa adalah kepemimpinan pembelajaran (Bell, et al. 2003; Hallinger 2011b; Hallinger dan Wang, 2015; Leithwood, et al. 2006; Robinson, et al. 2008; Southworth 2003). Hal ini juga memberikan alasan mengapa pihak sekolah harus fokus pada peningkatan kapasitas kepemimpinan pembelajaran sebagai penyangga untuk perbaikan sekolah (Hallinger, 2003, 2011b; Heck and Hallinger, 2009, 2014; Leithwood, et al. 2012; Robinson, et al. 2008).

Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional (2010:7) mengungkapkan sejumlah hasil penelitian para ahli tentang keefektifan peran kepemimpinan instruksional kepala sekolah menjadi skala prioritas untuk meningkatkan keefektifan sekolah dengan syarat memiliki pengetahuan tentang pengembangan kurikulum, guru dan pembelajaran, supervisi, pengembangan staf, dan evaluasi guru.

Hasil penelitian terbaru tentang kepemimpinan sekolah menunjukkan bahwa terdapat tiga cara pemimpin yang memberikan kontribusi untuk pembelajaran: (1) mendefinisikan visi, misi dan tujuan sekolah; (2) mendesain struktur dan proses akademik; dan (3) mengembangkan sumber daya manusia. Mengingat temuan ini, kami mengusulkan bahwa kepemimpinan pembelajaran adalah proses saling pengaruh yang bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi sekolah dari waktu ke waktu (Hallinger and Heck, 2011a, b; Hallinger dan Wang, 2015; Heck and Hallinger, 2011).

Bossert, et al. (dalam Hallinger dan Wang, 2015) mendefinisikan kepemimpinan pembelajaran sebagai konstruksi dari 'manajemen pembelajaran'. Manajemen pembelajaran tersebut dikonseptualisasikan sebagai tindakan dan strategi yang digunakan

oleh kepala sekolah untuk mempengaruhi organisasi pembelajaran di sekolah (*school's instructional organization*) dan iklim belajar (*learning climate*) dengan tujuan meningkatkan hasil belajar siswa (*improving learning outcomes for students*).

Kepemimpinan pembelajaran karya Hallinger dan Murphy mendefinisikan bahwa “*our conceptual framework incorporated three dimensions: defines the school mission, manages the instructional program, and develops a positive school learning climate*”. Jadi, ada 3 (tiga) peran kepemimpinan pembelajaran terdiri dari; a) menetapkan misi sekolah, b) mengelola program pembelajaran, dan c) mengembangkan iklim belajar yang positif di sekolah (Hallinger dan Wang, 2015:27).

Istilah kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan untuk belajar, dan kepemimpinan perbaikan sekolah memberikan isyarat adanya hubungan antara strategi pemimpin dan perkembangan siswa dalam belajar. Kepemimpinan pembelajaran yang maksud di dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran di tingkat sekolah, ketua program studi adalah pemimpin pembelajaran di tingkat program studi dan guru adalah pemimpin pembelajaran di tingkat kelas.

Hallinger dan Wang (2015) memberi saran bahwa penelitian tentang efek kepemimpinan sekolah harus memperhitungkan dari konteks organisasi. Ciri-ciri manajemen pembelajaran adalah kepemimpinan kepala sekolah dibingkai dalam konteks organisasi, dengan demikian mengakui bahwa kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri organisasi seperti ukuran dan kompleksitas sekolah, status sosial-ekonomi masyarakat, dan sosial budaya dari lingkungan

pendidikan (Belchetz and Leithwood, 2007; Bridges, 1977; Goldring, et al. 2008; Hallinger, 2011c; Hallinger dan Murphy, 1986; Hallinger dan Wang, 2015; Teddlie, et al. 2000; Wiley, 2001).

Hallinger dan Wang (2015:37) mengungkapkan bahwa *“the comprehensiveness of any of these models can be enhanced through the inclusion of personal antecedent (e.g. personal characteristics of the principal) or context (e.g. school size, school level, student SES) variables”*. Berbagai literatur tentang keefektifan sekolah SMK sebagai sistem sekolah, memiliki variabel konteks yang berefek pada jenis kepemimpinan pembelajaran bahwa *“the school context does have an effect on the type of instructional leadership exercised by principals (Hallinger and Heck, 1996a, 1996b). As suggested above, school level as well as the socio-economic status of the school influence the requirements for and exercise of instructional leadership” (e.g. Hallinger and Murphy, 1986)*. Selain yang disarankan diatas, peran kepemimpinan pembelajaran harus menyesuaikan terhadap kebutuhan, peluang dan kendala melalui konteks sekolah. Sehingga variabel konteks tentang kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah berkaitan dengan status sosial ekonomi sekolah (Andrews and Soder, 1987).

Hasil review Hallinger dan Heck (di dalam Hallinger, 2003:346) tentang efek kepemimpinan pembelajaran, dapat disimpulkan *“that it is virtually meaningless to study principal leadership without reference to the school context. The context of the school is a source of constraints, resources, and opportunities that the principal must understand and address in order to lead. Contextual variables of interest to principals include the student background, community type, organisational*

structure, school culture, teacher experience and competence, fiscal resources, school size, and bureaucratic and labour organization”.

Kerangka kerja oleh Bossert tentang manajemen pembelajaran yang patut diperhatikan adalah pendekatan kepemimpinan pembelajaran yang dibentuk oleh karakteristik kepribadian pemimpin pembelajaran (Goldring, et al. 2008; Hallinger, 2011a, b; Leithwood and Beatty, 2008; Leithwood, et al. 2008; Hallinger and Wang, 2015). Karakteristik kepribadian pemimpin pembelajaran berupa faktor demografi (misalnya pengalaman profesional sebelumnya, jenis kelamin, masa jabatan sebagai kepala sekolah) dan faktor sikap atau kecenderungan (misalnya kemampuan diri, daya tahan, optimisme, keterbukaan untuk belajar).

Sebuah penelitian tentang kepemimpinan pembelajaran yang dilakukan Hallinger (2003:333) mengemukakan bahwa *“instructional leadership behaviour (school level, school size, school SES), the effects of the school context on instructional leadership (e.g., gender, training, experience), as well as the effects of school leadership on the organization (e.g., school mission and goals, expectations, curriculum, teaching, teacher engagement) and school outcomes (e.g., school effectiveness, student achievement)”.*

Hallinger dan Wang (2015:27-35) mengungkapkan bahwa peran kepemimpinan pembelajaran terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu: (1) menetapkan misi sekolah (*defines the school mission*), terdiri dari meringkai tujuan sekolah (*frames the school goals*) dan mengomunikasikan tujuan sekolah (*communicates the school goals*); (2) mengelola program pembelajaran (*manages the instructional program*), terdiri dari mengawasi dan mengevaluasi pembelajaran (*supervises and*

evaluates instruction) dan mengoordinasikan kurikulum (*coordinates curriculum*), serta monitoring kemajuan siswa (*monitors student progress*); dan (3) mengembangkan iklim belajar yang positif (*develops a positive school learning climate*), terdiri dari menetapkan waktu pembelajaran (*protects instructional time*), menjaga visibilitas yang tinggi (*maintains high visibility*), memberikan insentif bagi guru (*provides incentives for teachers*) dan memberikan insentif untuk siswa (*provides incentives for learning*).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama kepemimpinan pembelajaran SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun adalah memberikan layanan prima kepada semua siswa agar mereka mampu mengembangkan potensinya karena kepemimpinan pembelajaran berkontribusi sangat signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar siswa.

1. Mendefinisikan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

Peran kepemimpinan pembelajaran dalam menetapkan misi sekolah tidak memiliki korelasi secara langsung dengan peningkatan prestasi belajar siswa. Menetapkan misi sekolah telah memiliki pedoman umum yang diatur dalam sistem pendidikan nasional. Peran yang paling urgen dan berkorelasi secara langsung dalam peningkatan prestasi belajar siswa adalah mengelola program pembelajaran dan mengembangkan iklim belajar yang positif. Berdasarkan urgensi tersebut, maka diperlukan telaah secara komprehensif peran kepemimpinan pembelajaran dalam mengelola program pembelajaran dan mengembangkan iklim belajar yang positif.

Mewujudkan visi, misi dan tujuan SMK merupakan salah satu faktor keefektifan kepemimpinan pembelajaran. Badan PSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013:88) menggarisbawahi kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran lainnya menjadi penentu utama keberhasilan sekolahnya. Tugas memimpin perubahan ada ditangannya. Selain sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran, manajer perubahan, dan pengembang budaya sekolah.

Kepemimpinan pembelajaran harus dapat menerapkan manajemen secara sistematis untuk mencapai visi, misi dan tujuan SMK yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan keefektifan kepemimpinan SMK harus memiliki kompetensi untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai pemimpin pendidikan. Sebuah penelitian kepemimpinan sekolah yang dilakukan selama tahun 1990-an oleh Hallinger dan Heck (1996a) dan Robinson, et al. (2008) mengidentifikasi bahwa “visi dan tujuan sekolah berdampak paling signifikan terhadap kepemimpinan kepala sekolah dalam membelajarkan siswa”.

Visi mengacu pada sebuah gambaran luas dari tujuan sekolah dan tujuan mengacu pada target spesifik yang perlu dicapai menuju visi. Keefektifan SMK memiliki pemimpin yang mampu berperan dalam mengoordinasikan, menggerakkan, dan menyetarakan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Visi, misi dan tujuan sekolah harus fokus pada pembelajaran dan peran penting kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran lainnya dalam mempertahankan fokus sekolah terhadap pembelajaran (Hallinger, 2003; Kurland, et al, 2010). Menginspirasi orang untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama adalah

untuk mencapai visi dan tujuan (Kantabutra, 2005, 2009, 2010; Thompson, 1968; Thompson dan McEwen, 1958; Ylimaki, 2006).

Kepemimpinan pembelajaran tidak hanya mendefinisikan atau menetapkan visi, misi dan tujuan sekolah, tetapi bertanggung jawab dalam memastikan bahwa visi, misi dan tujuan sekolah digunakan untuk berkomunikasi secara luas dengan staf. Dimensi ini adalah titik awal untuk terciptanya sekolah yang berpusat pada siswa (Hallinger dan Heck 2002; Knapp, et al. 2009). Lezotte dan Pepperl (1999:107-108) menyatakan bahwa *“in an effective school, the principal acts as an instructional leader, effectively and efficiently communicating the mission to staff, parents, and students. The principal understands and applies characteristics of instructional effectiveness in the management of the instructional program”*.

Penjelasan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengungkapkan bahwa “visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. Sedangkan Misi Pendidikan Nasional, yaitu “(1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global”.

Keefektifan sekolah harus mampu mengartikulasi visi dan misi sekolah, *“there is a clearly articulated school mission through which the*

staff shares an understanding of and commitment to instructional goals, priorities, assessment procedures, and accountability” (Kirk and Jones, 2004:3). Keefektifan visi, misi dan tujuan sekolah harus secara jelas diartikulasikan melalui berbagi pemahaman dan komitmen terhadap tujuan pembelajaran, prosedur penilaian, dan akuntabilitas staf yang tidak hanya fokus pada guru. Perencanaan dan implementasi visi dan misi sekolah sangat ditentukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Haberman (dalam Kirk and Jones, 2004:3) mengemukakan bahwa “to be effective in this role a principal should: create a common vision, build effective terms to implement that vision, and engender commitment to task-the persistent hard work needed to engender learning”.

Keefektifan sekolah harus memiliki pemimpin yang mampu berperan dalam mengoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Berdasarkan uraian tentang kepemimpinan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi dan guru sebagai pemimpin pembelajaran di SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun harus memiliki peran untuk menetapkan dan mengartikulasikan visi, misi dan tujuan SMK dengan menetapkan dan mengomunikasikan tujuan sekolah.

a. Menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

Keefektifan sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan serangkaian tujuan untuk meningkatkan prestasi siswanya.

Kepemimpinan pembelajaran menekankan kejelasan visi dan misi serta tujuan sekolah yang ditetapkan oleh kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran lainnya serta masyarakat. Pemimpin pembelajaran harus mencerminkan tujuan secara menyeluruh untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap program pembelajaran di sekolah. Terkait dengan hal tersebut, Leonard (2010:3) mengungkapkan bahwa:

Principals desirous of school improvement goal attainment have to proactively search for the means to the desired end. Principals must reflect on the overarching goal for the continuous improvement of the school's instructional program and the significance of their leadership for the accomplishment of these goals.

Merumuskan strategi merupakan salah satu keefektifan kepemimpinan pembelajaran yang meliputi penetapan visi, misi dan tujuan yang menjadi arah pengembangan, tujuan pengembangan, strategi pengembangan, dan penetapan kebijakan. Arah pengembangan dijabarkan dari visi dan misi menjadi indikator pencapaian tujuan. Keefektifan kepemimpinan pembelajaran adalah menentukan arah pengembangan sekolah yang direfleksikan dalam menetapkan kebijakan sekolah berbasis data sehingga keefektifan kepemimpinan pembelajaran di SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun memfasilitasi satuan pendidikan menentukan visi, misi, tujuan, dan strategi sekolah.

b. Mengomunikasikan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

Mengomunikasikan visi, misi dan tujuan sekolah terhadap guru, orang tua, siswa dan seluruh pemangku kepentingan adalah fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di tingkat sekolah. Hallinger dan Wang (2015:30) menyimpulkan hasil penelitian para pakar diantaranya Brookover and Lezotte, 1977; Edmonds, 1979; Hallinger, et al, 1996; Hallinger and Murphy, 1986; Heck, 1993, 2000; Kantabutra, 2005, 2009, 2010; Leithwood, et al, 2006; Leitner, 1994; Marks and Printy, 2003; Robinson, et al, 2008; Sun dan Leithwood, 2015; Ylimaki 2006 yang menyebutkan ada 2 jalur kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah dalam mengomunikasikan tujuan sekolah *“both formal communication channels (e.g. goal statements, staff bulletins, articles in the principal or site council newsletter, the school handbook, assemblies) and informal ones (e.g. parent conferences, teacher conferences, curricular meetings, other discussions with staff, can be used to communicate the school’s primary purpose”*.

Eichinger and Lombardo (dalam Leonard, 2010:56) menguraikan bahwa kompetensi inti yang dibutuhkan untuk kepemimpinan pembelajaran, yaitu *“managing vision and purpose: communicates a compelling and inspired vision or sense of core purpose; makes the vision sharable by everyone; can inspire and motivate entire units or organizations”*. Mengomunikasikan visi, misi dan tujuan sekolah dapat menginspirasi dan memotivasi seluruh unit atau organisasi sekolah.

Hallinger dan Murphy (1986) dalam Hallinger dan Wang (2015:30-31) mengemukakan bahwa peran kepemimpinan pembelajaran dalam mendefinisikan misi yang jelas, adalah: (1) misi

benar-benar jelas dan ditulis serta terlihat di sekitar sekolah; (2) misi difokuskan pada pengembangan akademik yang sesuai dengan kebutuhan sekolah; (3) misi menetapkan prioritas untuk pekerjaan guru; (4) misi diketahui dan diterima sebagai legitimasi oleh guru di sekolah; dan (5) misi itu diartikulasikan dan dimodelkan oleh kepala sekolah.

Sementara itu, Badan PSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014:44-45) mendefinisikan bahwa tugas pemimpin adalah: (1) menentukan arah dari pengembangan sekolah, mengembangkan visi masa depan dan strategi jangka panjang; (2) menyelaraskan hubungan komunikasi dalam mengembangkan dan menciptakan kerja sama untuk lebih memahami visi dan membangun komitmen untuk mewujudkannya; dan (3) memotivasi dan menginspirasi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dapat bergerak ke arah yang sesuai tujuan

Kepala sekolah harus menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif dalam menjalankan perannya ini, maka kepala sekolah harus membuat visi bersama, membangun keefektifan untuk melaksanakan visi tersebut, dan berkomitmen mengemban tugas, serta kerja keras terus-menerus untuk memotivasi belajar. Tugas penting lainnya adalah menyelaraskan hubungan kerja antar personal dengan seluruh pemangku kepentingan. Hubungan yang harmonis antar pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan serta hubungan para pemangku kepentingan merupakan prasyarat tercapainya tujuan. Hubungan yang efektif perlu dikembangkan melalui komunikasi, penciptaan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi antar komponen sistem internal sekolah

(Badan PSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014:48).

Visi, misi, dan tujuan SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun harus diperbaharui dan disesuaikan dengan permintaan kebutuhan masyarakat pengguna secara berkala dan kontinu sehingga keefektifan kepemimpinan pembelajaran di SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun mampu menetapkan visi, misi dan tujuan sekolah dalam jangka waktu tertentu dan mengomunikasikan visi, misi dan tujuan sekolah ke pemangku kepentingan sekolah.

2. Mengelola Program Pembelajaran

Kepemimpinan pembelajaran harus menjadi agen perubahan sekolah dan mampu mengubah pola pikir pendidik dan tenaga kependidikan. Pemimpin pembelajaran juga harus berperan sebagai manajer yang berfungsi mengelola perubahan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sekolah. Elemen perubahan di kelas yang inti adalah proses pembelajaran sebagai bagian dari perubahan kurikulum sekolah dari kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013.

Hallinger dan Wang (2015:31) mengungkapkan temuan dari Hallinger 2003; Hallinger and Heck, 1998; Leithwood, et al. 2006; Marks and Printy 2003; Murphy, 1988; Robinson, et.al, 2008; Spillane, 2006; Weick, 1976, 1982 bahwa kepemimpinan pembelajaran memiliki tanggung jawab mengelola pembelajaran yang fokus pada koordinasi dan monitoring pada pembelajaran dan kurikulum. Dimensi ini menggabungkan tiga fungsi kepemimpinan (apa yang disebut

manajemen), yaitu memonitoring dan mengevaluasi pembelajaran, mengoordinasikan kurikulum, dan memonitoring kemajuan siswa.

Lampiran peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2007 menunjukkan bahwa kepala sekolah harus memiliki lima kompetensi minimal yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kompetensi manajerial terkait dengan kepemimpinan sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal dan mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif serta mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah.

Dimensi tersebut di atas membutuhkan kepala sekolah dan para pemimpin pembelajaran lainnya untuk terlibat dalam mengstimulus, memonitoring dan mengevaluasi proses pembelajaran di sekolah. Hallinger dan Wang (2015:31) menyarikan dari Bossert, et al. 1982; Cuban, 1984; Dwyer, 1986; Dwyer, et. al. 1983a, b; Edmonds, 1979; Hallinger and Murphy, 1986; Marshall, 1996, 2004 bahwa fungsi ini juga menuntut agar kepala sekolah dan para pemimpin pembelajaran lainnya memiliki keahlian dalam proses pembelajaran dan memiliki komitmen untuk perbaikan sekolah. Perilaku khusus ini bukan persyaratan untuk kepemimpinan pembelajaran, namun mencerminkan tingkat keterlibatan kepala sekolah dalam memonitoring kemajuan siswa dan mengelola program pembelajaran.

Direktorat Pembinaan SMK (2014:3) menetapkan Garis-garis Besar Program Pembinaan SMK yang substansi inti pengelolaannya diarahkan pada pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah

sebagai *entitas quality assurance*, mendorong aktivasi peran komite sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembelajaran, dan dewan pendidikan di tingkat kabupaten. Sehingga keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dan para pemimpin pembelajaran lainnya dalam pembelajaran di SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun dapat dilihat dari peran menjalankan pengelolaan pembelajaran melalui monitoring dan evaluasi pembelajaran, mengoordinasikan kurikulum dan memonitoring kemajuan siswa.

a. Mengoordinasikan Kurikulum

Karakteristik yang menonjol di keefektifan sekolah secara pembelajaran adalah tingkat koordinasi kurikulum. Tujuan kurikulum berkaitan erat dengan isi yang diajarkan di kelas dan hasil tes prestasi siswa. Kepemimpinan pembelajaran yang profesional memerlukan daya adaptasi terhadap perubahan kurikulum sebagai sesuatu yang seharusnya karena ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan kehidupan terus berubah, maka kebutuhan siswa pun terus berubah menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya (Badan PSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014:42).

Persoalannya adalah bagaimana mengomunikasikan kurikulum berbasis kompetensi, mensinergikan dan mengintegrasikan mata pelajaran menjadi kompetensi yang meliputi kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan pada SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun. Dalam rangka mempersiapkan kurikulum 2013 yang realistis untuk memenuhi persyaratan kerja yang ada (kebutuhan masyarakat). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum menyatakan bahwa pengembangan

kurikulum merupakan kegiatan sistematis dan terencana yang terdiri atas kegiatan pengembangan ide kurikulum, dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Keempat dimensi pengembangan kurikulum ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan keseluruhan proses pengembangan.

Sehubungan dengan tanggungjawab tersebut, Reeves (dalam Marzano, 2005:54) menekankan keterlibatan kepala sekolah dan para pemimpin pembelajaran lainnya dalam praktik penilaian, dimana dijelaskan bahwa *“the principal personally evaluates student work and participates in collaborative scoring sessions in which the percentage agreement by the faculty is measured and posted. The principal personally reviews faculty-created assessments as part of each teacher evaluation and coaching meeting”*. Perilaku dan karakteristik kepala sekolah yang terkait dengan tanggungjawab terlibat dalam kurikulum, pengajaran, dan penilaian dapat secara langsung terlibat dalam membantu guru merancang kegiatan kurikulum, mengatasi isu-isu penilaian dan mengatasi isu-isu pembelajaran.

Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi dan guru sebagai pemimpin pembelajaran, juga harus memiliki pengetahuan tentang kurikulum, pengajaran, dan penilaian. *Attests to the importance of this responsibility by explaining that a principal’s knowledge of effective practices in curriculum, instruction, and assessment is necessary to provide guidance for teachers on the day-to-day tasks of teaching and learning* (Marzano, 2005:54). Kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran lainnya harus memiliki pengetahuan praktik yang efektif dalam memonitoring kurikulum, pembelajaran, dan

penilaian untuk memberikan bimbingan kepada guru dalam menjalankan tugas-tugas.

Keefektifan kepemimpinan pembelajaran di SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun dapat diukur dari penerapan, pengembangan dan monitoring kurikulum. Penerapan, pengembangan dan monitoring kurikulum merupakan peran keefektifan kepemimpinan pembelajaran baik di SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun dalam meningkatkan prestasi siswa. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi dan guru sebagai pemimpin pembelajaran, harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang penerapan kurikulum, pembelajaran, praktik penilaian dan penanganan kelas secara efektif.

b. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

Tanggung jawab monitoring dan evaluasi di kelas baik secara formal maupun informal merupakan sejauhmana peran pemimpin pembelajaran di sekolah memiliki kontak dan berinteraksi dengan guru, siswa, dan orang tua. Marzano, et al. (2005:18) mengungkapkan bahwa *“they identify four dimensions, or roles, of an instructional leader: resource provider, instructional resource, communicator, and visible presence. As a visible presence the principal engages in frequent classroom observations and is highly accessible to faculty and staff.* Empat peran pemimpin pembelajaran sebagai penyedia sumber daya, sumber daya pembelajaran, komunikator, dan visibilitas. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi dan guru yang memiliki visibilitas yang tinggi, maka sering terlibat dalam observasi kelas dan sangat mudah di akses oleh guru dan staf. Pemimpin pembelajaran yang mempertahankan visibilitas yang tinggi,

memberikan indikator bahwa *stakeholder* sekolah dan siswa menjadi skala prioritas kepemimpinannya.

Meskipun para pemimpin pembelajaran memiliki sebagian besar waktu di luar kendalinya, namun visibilitas yang tinggi di sekolah dan di kelas dapat meningkatkan interaksi antara para pemangku kepentingan dan siswa serta memiliki efek positif terhadap perilaku siswa dan pembelajaran di kelas. Tanggung jawab visibilitas umumnya terkait dengan kepemimpinan pembelajaran, Marzano, et al. (2005:18) menjelaskan pentingnya visibilitas para pemimpin pembelajaran yaitu *“the research has demonstrated the great need for strong instructional leadership in schools and has identified several common characteristics of effective leaders. One of those characteristics, extremely important in the life of a school and often neglected, is that of being a visible principal.*

Peran pemimpin pembelajaran memberikan pesan bahwa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi dan guru yang tertarik dan terlibat dalam melakukan observasi di sekolah dan di DU-DI, serta memberikan kesempatan bagi para pemimpin pembelajaran untuk berinteraksi dengan siswa. Keefektifan kepemimpinan pembelajaran di SMK 3 tahun dan di SMK 4 tahun dapat diukur dari peran visibilitas yang tinggi di kelas, sekolah dan DU-DI. Visibilitas yang tinggi diimplementasikan dalam bentuk menjalin hubungan baik dan menunjukkan adanya komunikasi dan kerjasama dalam semua aspek sekolah.

Badan PSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014:40) mendefinisikan bahwa “kepemimpinan pembelajaran secara langsung terjadi ketika kepala sekolah bekerja dengan para guru dan staf lainnya untuk mengembangkan proses pembelajaran”. Kepala

sekolah memiliki kemampuan dalam membimbing dan memfasilitasi perbaikan proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pengelolaan kelas.

Kepala sekolah dalam perencanaan proses pembelajaran harus memiliki kemampuan membimbing guru pada aktivitas: (a) mengidentifikasi kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan siswa, (b) menyusun tujuan pembelajaran, (c) mengembangkan silabus, (d) mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran, (e) memilih bahan ajar, (f) memilih metode mengajar yang sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik mata pelajaran, dan (g) memilih media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik mata pelajaran.

Kepala sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran harus membimbing dan memfasilitasi para guru dalam mengembangkan dan menggunakan berbagai metode mengajar misalnya pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), pembelajaran *kontekstual* (*contextual teaching learning*), *Lessons Study*, simulasi, curah pendapat, kerja kelompok, diskusi kelompok, metode proyek, dan sebagainya (Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional (2010:35).

Untuk mengevaluasi keefektifan kepemimpinan pembelajaran, maka sangat penting untuk dilakukan penilaian proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun tercermin dalam penguasaan kompetensi pada proses pembelajaran di sekolah dan di DU-DI yang dikenal dengan prakerin sehingga peran kepemimpinan pembelajaran memperoleh porsi waktu yang lebih besar dibanding dengan peran-peran yang lain.

c. Monitoring Perkembangan Siswa

Kepemimpinan pembelajaran adalah kepemimpinan yang memfokuskan atau menekankan pada pembelajaran, salah satu komponennya adalah asesmen (penilaian hasil belajar). Penilaian hasil belajar meliputi aspek yang di evaluasi, metode evaluasi, dan pelaporan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa “standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik”. Dan pasal 19 ayat 3 mengatakan bahwa “setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien”.

Pada peraturan pemerintah tersebut, pasal 22 ayat 1-2 mengatakan bahwa “penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok”. Sementara Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lampiran diungkapkan bahwa

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*)

yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak *pembelajaran* (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*) dari pembelajaran. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dijelaskan bahwa “standar penilaian yang bertujuan untuk menjamin: (1) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian; (2) pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan (3) pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa “penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian

berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah”.

Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi dan guru dalam memerankan dirinya sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya dapat memenuhi enam prinsip, yaitu: (1) membangun tujuan bersama; (2) meningkatkan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum; (3) mengembangkan motivasi pendidik dalam mengembangkan kompetensi; (4) menjamin pelaksanaan mutu proses pembelajaran melalui pelaksanaan monitoring atau supervise; (5) mengembangkan sistem penilaian dalam memantau perkembangan belajar peserta didik; dan (6) mengambil keputusan berbasis data (Badan PSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014:46)

Hallinger dan Wang (2015:32) mengungkapkan bahwa kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran lainnya memainkan peran kunci di bidang monitoring perkembangan siswa dengan beberapa peran:

The principal plays a key role in this area in several ways. He/she can provide teachers with test results in a timely and useful fashion, discuss test results with the staff as a whole, with grade level staff and individual teachers, and provide interpretive analyses for teachers detailing the relevant test data in a concise form. (Anderson, Leithwood and Strauss, 2010; Brookover, et al. 1982; Edmonds, 1979; Hallinger, et al. 2013; Hattie, 2009; Heck, 2000, 2006; Knapp, et al. 2009; Purkey and Smith, 1983)

Stronge dalam Surya Darma dkk (2013:45) mengungkapkan salah satu kompetensi guru adalah monitoring perkembangan dan potensi siswa (*student progress and potential*), pemimpin pembelajaran yang efektif harus memiliki kompetensi untuk memonitoring dan mengevaluasi perkembangan siswa. Penilaian difokuskan pada pekerjaan rumah (*home work*), kemajuan belajar siswa (*student progress*) dan perhatian pada kebutuhan dan kemampuan siswa (*responding to student need and abilities*). Sehingga keefektifan kepemimpinan pembelajaran di SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun dalam memonitoring proses belajar di dalam kelas sangat penting dilakukan untuk mengetahui perkembangan siswa. Terkhusus untuk pendidikan kejuruan baik SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun, membutuhkan keefektifan kepemimpinan pembelajaran dalam memonitoring perkembangan siswa baik di kelas (sekolah) maupun di saat praktik kerja di DU-DI.

3. Mengembangkan Iklim Belajar yang Positif

Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi dan guru memberikan pengaruh terhadap pembelajaran dengan melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif. Hallinger dan Heck (1998) menyebut sebagai “*shaping academic structures and processes*”. Leithwood, et al. (2006, 2008, 2010) dan Leithwood & Sun, (2012) menyebut sebagai “*designing the organization*”. Hallinger dan Wang (2015:33) mengungkapkan kepemimpinan pembelajaran memainkan peran penting dengan memperhatikan struktur kerja dan proses organisasi (sekolah), seperti terjadinya interaksi dan keterlibatan guru dalam penggunaan kelas dan

pola pembelajaran. Dalam hal budaya sekolah (*school's culture*), struktur kerja juga dapat membentuk harapan, norma-norma dan kapasitas sekolah (Barth, 2001; Deal dan Peterson, 2009; Leithwood, et al, 2008; Sashkin, 1988; Saphier dan King, 1985).

Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional (2010:27) menyatakan bahwa ada lima hal yang dianggap penting dalam membentuk budaya sekolah yang dapat melatih siswa dalam mencapai keberhasilan belajar dan iklim sekolah yang sehat yaitu: (1) sekolah sebagai komunitas kolaboratif dan komunitas belajar; (2) ada keyakinan bersama untuk mencapai tujuan; (3) peningkatan sekolah dicapai melalui proses pemecahan masalah; (4) seluruh warga sekolah apakah itu kepala sekolah, guru dan siswa diyakinkan dapat mencapainya; dan (5) pembelajaran merupakan prioritas utama.

Iklim sekolah yang positif dapat mengomunikasikan kepada staf tentang harapan yang tinggi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, menjadikan pembelajaran sebagai fokus utama kegiatan sekolah, mengenal secara pribadi tentang tingkat profesionalisme masing-masing guru sebagai dasar untuk mencapai tujuan utama sekolah, menilai moral dan komitmen warga sekolah, dan membangun lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan disiplin.

Seorang pemimpin pembelajaran yang efektif membangun budaya yang positif untuk mempengaruhi siswa secara positif, Leithwood dan Riehl (2003:8) menjelaskan bahwa:

Leaders act through and with other people. Leaders sometimes do things, through words or actions, that have a direct effect on the primary goals of the collective, but more often their agency consists of influencing the

thoughts and actions of other persons and establishing policies that enable others to be effective.

Tujuan pengembangan budaya sekolah adalah untuk membangun suasana sekolah yang kondusif melalui pengembangan komunikasi dan interaksi yang sehat antara kepala sekolah dengan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Pemimpin pembelajaran dalam menunjang pengembangan budaya sekolah dapat menegakkan lima prinsip mendukung pengembangan budaya sekolah: (1) visioner, tujuan terukur dan objektif; (2) pemimpin partisipatif, mengambil keputusan bersama; (3) inovatif dan yakin guru dan siswa dapat berprestasi; (4) membangun persepsi dia pemimpin ‘benar’; dan (5) mengembangkan kerja sama pendidik secara formal dan nonformal.

Badan PSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013:37-38) mengungkapkan bahwa “kepala sekolah mampu mengelola sumber daya yang sekolah miliki secara efektif dalam menjamin terwujudnya keunggulan pemenuhan standar kompetensi lulusan pada melaksanakan kurikulum 2013 melalui pembangunan budaya sekolah”. Dimensi mengembangkan iklim belajar yang positif di sekolah mencakup beberapa fungsi yaitu melindungi pembelajaran (*instructional time*), mengembangkan keprofesionalan staf, menjaga visibilitas yang tinggi, menyediakan insentif untuk guru, dan menyediakan insentif untuk siswa (Hallinger, 2003; Leithwood, et. al, 2006).

Keefektifan sekolah secara pembelajaran dalam mengembangkan budaya tentang peningkatan secara menerus di

mana imbalan selaras dengan tujuan dan praktik (Glasman 1984; Hallinger, et al. 1996; Hallinger dan Heck, 2010, 2011a, b; Hallinger dan Murphy 1986; Heck dan Hallinger, 2009, 2010, 2011; Heck, et al. 1990; McDill, et al, 1969; Mortimore, 1993; Purkey dan Smith, 1983; Walker, 2012). Hallinger dan Wang (2015) menegaskan bahwa pemimpin pembelajaran harus memodelkan nilai-nilai dan praktik-praktik yang mendukung perbaikan terus-menerus kegiatan pembelajaran (Dwyer, 1986; Hallinger, 2003; Hallinger dan Murphy, 1985; Leithwood dan Jantzi, 2005; Leithwood, et al, 2008; Leithwood dan Sun, 2012; Marks dan Printy, 2003).

Keefektifan kepemimpinan pembelajaran di SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun dalam membangun iklim sekolah positif perlu ditelaah lebih lanjut karena keefektifan kepemimpinan pembelajaran mempunyai fungsi membangun iklim sekolah yang positif melalui komunikasi dan interaksi yang antar *stakeholder*. Keefektifan kepemimpinan pembelajaran dapat dilihat dalam perannya mengembangkan iklim belajar positif dapat dilakukan melalui penetapan waktu pembelajaran, mempertahankan visibilitas yang tinggi, memberikan penghargaan kepada guru dan siswa, serta mengembangkan keprofesionalan guru dan staf.

a. Menetapkan Waktu Pembelajaran

Kurikulum setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif

dan hari libur. Stallings dan yang lain menyebut bahwa menetapkan waktu pembelajaran (*protects instructional time*) sebagai perhatian terhadap pentingnya menyediakan jadwal mengajar bagi guru dan instruktur tidak terganggu dalam menjalankan tugas (Hallinger dan Wang, 2015:33).

Keefektifan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran lainnya memainkan peran untuk merumuskan dan menetapkan jadwal pembelajaran dengan *“start by communicating to anyone within the reach of your words that instruction is the most important topic on the school’s agenda. As the leader you will enforce this imperative by your actions and words. It may take time but people inside and outside the organization will begin to receive the message”* (Leonard, 2010:34).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 5 ayat 1-2 disebutkan bahwa *“(1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik”*.

Keefektifan kepemimpinan pembelajaran melalui monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk memenuhi kewajiban dan memastikan bahwa proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, jadwal pelaksanaan memenuhi target waktu, tahap pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan, dan hasil yang diharapkan sesuai dengan target. Dalam proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai meleset dari target, maka kepala sekolah dan pemimpin

pembelajaran lainnya segera melakukan perbaikan proses, agar hasil akhir yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan (Badan PSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013:49). Sehingga keefektifan kepemimpinan pembelajaran di SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun dapat menetapkan dan melindungi jadwal mengajar para guru dan instruktur dari gangguan internal maupun eksternal sekolah dan DU-DI untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.

b. Memberikan Insentif Kepada Guru

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 15-16 berbunyi “Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional”. Kouzes dan Posner (1999:19) menekankan fakta bahwa penghargaan mengirim pesan kepada guru dan staf.

In recognizing individuals, we sometimes get lost in the ceremonial aspects. We think about form, but we forget substance. Recognitions are reminders; quite literally, the word recognize comes from the Latin to “know again.” Recognitions are opportunities to say to everyone, “I’d like to remind you one more time what’s important around here. Here’s what we value (Marzano, et al. 2005:46).

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1 berbunyi dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: (1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (3) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual (HKI); (4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (5) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; (6) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik; (7) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; (8) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; (9) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; (10) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan (11) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 40 ayat 1 mengatakan bahwa “Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e.

kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas”.

Keefektifan kepemimpinan pembelajaran di SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun dapat diukur dari peran dalam memberikan dan mengusahakan insentif bagi guru yang berprestasi berdasarkan regulasi yang berlaku. Dengan pemberian insentif terhadap guru sebagai pemimpin pembelajaran di tingkat kelas, guru dapat lebih termotivasi dalam mengembangkan kompetensinya sebagai guru yang efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.

c. Memberikan Insentif Kepada Siswa

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan). Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2017) menerbitkan Petunjuk Teknik Bantuan Beasiswa untuk siswa berprestasi, dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan mendukung peningkatan bakat, minat dan prestasi peserta didik SMK serta sebagai ajang promosi SMK, maka diperlukan pemberian penghargaan sebagai stimulan bagi generasi muda agar tertarik menekuni bakat dan minat pada bidang-bidang kemampuannya.

Memberikan motivasi kepada siswa dalam mengembangkan minat dan bakat untuk memperoleh prestasi di bidang akademik maupun non akademik, memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi, dan memberi motivasi dan dorongan kepada siswa SMK

untuk tetap berupaya selalu berprestasi dan lebih maju. Kepemimpinan pembelajaran memiliki peran untuk meningkatkan motivasi para pemangku kepentingan. Motivasi dari internal para pemimpin pembelajaran dapat menetapkan target yang lebih tinggi daripada pencapaian sebelumnya dan memberikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan yang mencapai target tersebut. Peningkatan motivasi eksternal dari para pemimpin pembelajaran dapat meningkatkan semangat berkompetisi dan penetapan *benchmarking* sekolah pesaing yang sejenis. (Badan PSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014:48)

Keefektifan kepemimpinan pembelajaran memiliki peran memberikan harapan bagi siswa untuk dihargai dan diakui prestasinya. Pemberian penghargaan tidak perlu mewah atau mahal, tetapi siswa harus memiliki kesempatan untuk diakui prestasinya baik di kelas maupun di sekolah secara keseluruhan (Brookover, et al, 1982; Hallinger, et al, 1983; Lasley and Wayson, 1982; McDill, et al, 1969; Wynne, 1980). Sehingga keefektifan kepemimpinan pembelajaran di SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun dapat ditunjukkan dengan memberikan insentif bagi siswa yang berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik.

B. Keefektifan Proses Pembelajaran di Sekolah

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari tiga unsur, yaitu tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Lebih lanjut pada pasal 4 ayat 4 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah yaitu kognitif, psikomotorik dan afektif secara utuh, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya sehingga proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan silabus, pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pemilihan buku pelajaran, pemilihan metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran dan fasilitas belajar lainnya, pengelolaan kelas, dan pemotivasian siswa (Dirjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:9).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa “standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan”.

Proses pembelajaran menekankan pada “guru memberi tahu” merupakan ciri pada kurikulum sebelumnya menjadi proses pembelajaran “siswa mencari tahu” pada kurikulum 2013 (Badan PSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014:19). Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 19 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 pasal 1 ayat 16 berbunyi “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan pada lampiran pendahuluan mengatakan bahwa:

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Zais (1976:350) mendefinisikan aktivitas belajar sebagai *“meaningful learning activities represent the heart of the curriculum because they are so influential in shaping the learner’s experience and thus his education*

Hal yang menarik dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2013 tersebut, struktur kurikulum terdiri atas 2 jenis SMK/MAK, yaitu SMK/MAK 3 tahun dan SMK/MAK 4 tahun. Dari sisi mata pelajaran kedua jenis SMK/MAK adalah sama, namun yang membedakan kedua jenis SMK/MAK yaitu SMK/MAK 4 tahun memiliki tambahan selama 1 (satu) tahun jumlah alokasi waktu per minggu dalam menerima mata pelajaran sebanyak 48 jam. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan di satuan pendidikan dan/atau industri, untuk SMK/MAK 3 tahun dilaksanakan pada kelas XII dan SMK/MAK 4 tahun dilaksanakan pada kelas XIII.

Salah satu indikator keberhasilan dunia pendidikan adalah standar kompetensi yang tersirat dalam kurikulum yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis standar kompetensi merupakan salah satu ciri dari pendidikan kejuruan yang menekankan pada penguasaan kompetensi pengetahuan, ketarampilan dan sikap. Dunia pendidikan di Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya untuk perbaikan mutu lulusan dengan mereformasi kurikulum dengan dibarengi berbagai standar.

Kurikulum yang tepat untuk pendidikan kejuruan baik program SMK 3 tahun maupun program SMK 4 tahun adalah kurikulum berbasis kompetensi dengan berdasarkan *“outcomes-based curriculum”*. Pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian

kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Desember 2012).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK pada Struktur Kurikulum SMK/MAK, di mana pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar pada setiap sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan”.

Peraturan tersebut tidak memperlihatkan perbedaan kurikulum SMK dan SMA, sebagaimana dijelaskan dalam struktur kurikulum SMK/MAK bahwa “Kurikulum SMK/MAK dirancang dengan pandangan bahwa SMA/MA dan SMK/MAK pada dasarnya adalah pendidikan menengah, bedanya hanya pada pengakomodasian minat peserta didik saat memasuki pendidikan menengah. Oleh karena itu, struktur umum SMK/MAK dengan struktur umum SMA/MA disamakan, yakni ada tiga kelompok Mata pelajaran: Kelompok A, B, dan C”.

Kurikulum SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun memiliki perbedaan dari segi lamanya masa studi, termasuk lama pendidikan di sekolah dan lama pendidikan di DU-DI, struktur kurikulum SMK 3 tahun dan SMK pada tabel 5.1 dan tabel 5.2.

Tabel 5.1 Struktur Umum Kurikulum SMK/MAK (Program 3 Tahun)

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Belajar Per Minggu		
		X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2
6.	Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)				
7.	Seni Budaya*	2	2	2
8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu		24	24	24
Kelompok C (Peminatan)				
Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi (SMK/MAK)		24	24	24

Jumlah Jam Pelajaran yang harus ditempuh per-minggu	48	48	48
--	-----------	-----------	-----------

Keterangan:

□: Pembelajaran dapat dilaksanakan di satuan pendidikan dan/atau di industri (terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio sebagai instrumen utama penilaian.

Tabel 5.2 Struktur Umum Kurikulum SMK/MAK (Program 4 Tahun)

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Belajar Per Minggu			
		X	XI	XII	XIII
Kelompok A (Wajib)					
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2	2
6.	Bahasa Inggris	2	2	2	2
Kelompok B (Wajib)					
7.	Seni Budaya*	2	2	2	2

8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3	3
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu		24	24	24	24
Kelompok C (Peminatan)					
Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi (SMK/MAK)		24	24	24	24
Jumlah Jam Pelajaran yang harus ditempuh per-minggu		48	48	48	48

Keterangan:

: Pembelajaran dapat dilaksanakan di satuan pendidikan dan/atau di industri (terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio sebagai instrumen utama penilaian.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK mengatakan bahwa “pada SMK/MAK, Mata Pelajaran Kelompok Peminatan (C) terdiri atas: Kelompok Mata Pelajaran Dasar Bidang Keahlian (C1); Kelompok Mata Pelajaran Dasar Program Keahlian (C2); kelompok Mata Pelajaran Paket Keahlian (C3)”.

Kemajuan teknologi dan informasi mengharuskan SMK berkembang mengikuti arah perkembangan dunia kerja atau DU-DI, dan perlu melakukan penyesuaian dengan mendesain kompetensi

pada kurikulum. Keberhasilan kurikulum pendidikan kejuruan dapat diukur pada tingkat kompetensi dan kemampuan lulusan terserap di dunia kerja atau membuka lapangan kerja baru. Finch and Crunkilton (1984:12) menyatakan bahwa *“the ultimate success of a vocational and technical curriculum is not measured merely through student educational achievement but through the result of that achievement-result that take the form of performance in the work world”*. Kurikulum pendidikan kejuruan yaitu berafiliasi pada proses yang dirancang sekolah untuk menghasilkan lulusan yang diharapkan terserap pada lapangan kerja.

Kurikulum sekolah kejuruan memiliki karakteristik tersendiri karena masing-masing program keahlian memiliki karakteristik berdasarkan permintaan pasar kerja. Dharma, dkk. (2013:317-318) mengemukakan bahwa karakteristik kurikulum sekolah kejuruan, yaitu: (1) berorientasi pada proses dan produk; (2) justifikasi isi kurikulum ditentukan bersama oleh sekolah dan masyarakat; (3) lingkungan belajar merupakan simulasi tempat kerja; (4) responsif terhadap perkembangan teknologi yang ada di masyarakat; (5) biaya penyelenggara relatif mahal; (6) standar kompetensi kelulusan dinilai oleh industri; dan (7) kualitas kurikulum dinilai dari eksistensi kerjasama antara sekolah dengan DU-DI.

C. Keefektifan Pembelajaran di DU-DI

Dalam menyiapkan tenaga terampil untuk menjawab tujuan pendidikan kejuruan khusus model SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun, maka peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan kejuruan harus menjadi prioritas dalam pembangunan terutama menyambut pasar bebas. Untuk memenuhi kebutuhan calon tenaga

kerja yang terampil dan berkualitas, maka dibutuhkan suatu sistem pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada sistem pendidikan yang secara langsung terkait dengan tuntutan dan kebutuhan dunia kerja.

Bukit (2014:47) memberikan defenisi bahwa “pendidikan dengan model sistem ganda mengandung dua subsistem, yaitu subsistem industri dan subsistem sekolah dengan keharusan pada adanya koordinasi yang kuat antara satu dengan lain”. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem PSG dapat didefinisikan sebagai kombinasi sub-sistem pendidikan di sekolah dan sub-sistem DU-DI yang secara khusus di bidang keahlian profesional yang dipilih sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan cara bekerja sambil belajar (*learningby doing*) secara langsung pada keadaan yang nyata. Untuk memaksimalkan PSG, maka diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Pengelolaan, yaitu wakil kepala SMK bidang hubungan industri melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Pelaksanaan PSG merupakan salah satu muatan dalam kurikulum yang wajib dilaksanakan siswa SMK baik SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun, namun kedua program ini memiliki karakteristik yang berbeda. Prakerin bertujuan untuk memberikan pengalaman pada DU-DI yang sesungguhnya kepada peserta didik sehingga terjadi proses aktualisasi dalam menerapkan hasil pembelajaran di sekolah dan mengaktualisasikan pendidikan di DU-DI. Pelaksanaan prakerin pada SMK 3 tahun umumnya dilaksanakan 3-4 bulan, namun waktu

pelaksanaannya ditentukan setiap sekolah karena sangat tergantung pada kesediaan DU-DI. Beberapa SMK 3 tahun yang menetapkan pelaksanaan prakerin di kelas XI dan ada pula pada saat kenaikan kelas dari kelas XI ke kelas XII dengan memanfaatkan waktu libur sekolah.

Pola prakerin SMK 4 tahun berbeda dengan SMK 3+1 tahun, keduanya menggunakan masa studi 4 tahun tetapi siswa SMK 4 tahun terikat dengan masa studi 4 tahun. Sementara SMK 3+1 tidak terikat pada masa studi 4 tahun karena setelah UN tidak diwajibkan mengikuti pola magang 1 tahun namun dapat mencari kerja atau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Siswa tidak perlu lagi untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas XIII. Siswa di SMK 4 tahun mengikuti UN pada kelas XII sebagaimana siswa di SMK 3 tahun.

Sementara itu, siswa SMK 4 tahun setelah mengikuti UN, maka diwajibkan untuk mengikuti prakerin atau magang selama 7-8 bulan. Hal ini sifatnya terikat karena pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan di akhir tahun keempat. Kelebihan pelaksanaan prakerin setelah UN yaitu siswa tidak terbebani dengan UN yang membutuhkan konsentrasi untuk mengetahui hasil UN karena prakerin dilaksanakan cukup lama, maka sangat memungkinkan perusahaan mengikat dan mengangkatnya menjadi karyawan setelah uji kompetensi diakhir tahun keempat. Hal ini berdampak pada alumni SMK 4 tahun hampir terserap di DU-DI dan sangat sedikit melanjutkan ke jenjang lebih tinggi sehingga dapat diasumsikan bahwa pola PSG pada SMK 4 tahun sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan.

Evaluasi pendidikan sistem ganda merupakan bagian integral dari keseluruhan program pendidikan. Mengingat konsep pendidikan sistem ganda dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan

program melibatkan lembaga pendidikan dan lembaga industry, maka evaluasi program sistem ganda memiliki karakteristik yang berbeda dengan evaluasi pendidikan secara umum.

Made (1996:63-64) mengemukakan bahwa “proses evaluasi dalam program pendidikan sistem ganda harus dilakukan pada proses pendidikan di sekolah dan juga proses pendidikan di industri. Evaluasi tersebut dilakukan baik pada tahap perencanaan, maupun tahap pelaksanaan”. Dengan demikian diharapkan program pendidikan sistem pembelajaran ganda dapat selalu dikembangkan sesuai dengan hasil evaluasi program yang dilakukan

Adanya alternatif program SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun, maka masyarakat dan calon peserta didik dapat memilih orientasi SMK yang diminati. Dengan lama studi sekitar 3 atau 4 tahun, lulusan SMK diharapkan mampu untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang telah ditekuni. Keberadaan program SMK 4 tahun dalam regulasi sistem pendidikan nasional, maka sepatutnya program ini memiliki kelebihan atau penghargaan yang lebih tinggi dari program SMK 3 tahun baik jenjang karir di DU-DI maupun pengakuan lebih tinggi pada dunia pendidikan tinggi. Sehingga perlu ditelaah lebih lanjut keefektifan SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun khususnya keefektifan pembelajaran di DU-DI dalam meningkat prestasi belajar siswa melalui monitoring dan evaluasi proses belajar di sekolah maupun DU-DI.

BAB 6

KEEFEKTIFAN SMK DALAM MENINGKATKAN PRESTASI SISWA (PRODUCT)



Peran pendidikan kejuruan berbeda dengan pendidikan umum, peran pendidikan kejuruan menyiapkan lulus yang berprestasi, terampil dan siap berkerja di DU-DI atau praktisi (*entrepreneur*) serta dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mengutamakan praktik, memiliki peluang memasarkan barang dan/atau jasa dan memiliki industri pasangan untuk prakerin. Pendidikan kejuruan memberikan peluang bagi siswa untuk mendapatkan pembelajaran di sekolah dan terjun langsung ke DU-DI. Dengan pembelajaran yang efektif di sekolah dan DU-DI, maka dapat meningkatkan prestasi belajar, terampil dan siap berkerja sesuai dengan bidang keahliannya.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 20 mengatakan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Kompetensi merupakan capaian dalam proses pembelajaran, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 4 mengatakan bahwa “kompetensi

adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu”.

Scheerens (2008:18) menyatakan bahwa *“school effectiveness refers to the performance of the organizational unit called ‘school’. The performance of the school can be expressed as the output of the school”*. Keefektifan sekolah merujuk pada kinerja sistem organisasi pendidikan yang disebut sekolah. Kinerja sekolah dapat diperlihatkan melalui *product* atau *outcomes* sekolah tersebut yang pada gilirannya diukur sesuai dengan prestasi rata-rata siswa pada akhir masa pendidikan formal di sekolah. Persoalan keefektifan sekolah menarik karena secara umum dapat diketahui bahwa kinerja sekolah itu berbeda-beda.

Keefektifan SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun tidak hanya harus diukur berdasarkan perbedaan kinerja secara keseluruhan, melainkan hubungan sebab akibat yang muncul. Tujuan utama dari keefektifan SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun adalah memberikan harapan yang tinggi kepada siswa, guru, orang tua, dan masyarakat agar lulusan memiliki bekal dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah dan masyarakat telah menaruh harapan besar terhadap tingkat kebutuhan SMK agar tetap pada tujuannya, yaitu melahirkan tenaga terampil dibidangnya, menanggulangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi kinerja SMK yang telah ada dewasa ini masih belum optimal. Harapan yang tinggi pada lulusan baik SMK 3 tahun maupun

SMK 4 tahun diantaranya: (1) tingkat keterserapnya lulusan di DU-DI berdasarkan kompetensi pada program keahliannya yang telah dipilihnya; (2) tingkat penciptaan lapangan kerja baru bagi dirinya dan masyarakat berdasarkan jiwa kewirausahaan dengan kompetensi pada program keahliannya yang telah dipilihnya; (3) tingkat keterserapan, kuantitas dan kompetisi dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; (4) menyediakan tenaga kerja tingkat menengah, tetapi perkembangan karir saat ini semakin menuntut tingkat pendidikan, sehingga lulusan SMK terserap pada DU-DI dan sebagian melanjutkan ke perguruan tinggi.

Lulusan SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun ditekankan pada harapan yang tinggi pada keterserapan di DU-DI atau membuka usaha baru sesuai dengan kompetensi keahliannya, dan sebagian melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, SMK kedepan harus berusaha agar penguasaan kompetensi lulusannya meningkat dan relevan dengan kebutuhan pasar. Kemajuan teknologi dan informasi mengharuskan SMK berkembang mengikuti arah perkembangan DU-DI, sehingga SMK perlu melakukan penyesuaian dengan mendesain kompetensi yang sesuai kebutuhan, khususnya program SMK 4 tahun dengan mempertimbangkan relevansi terhadap tuntutan DU-DI.

Dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, mengharuskan SMK berkembang mengikuti arah perkembangan dunia kerja atau DU-DI, sehingga SMK perlu melakukan penyesuaian dengan mendesain kompetensi khususnya program SMK 4 tahun dengan mempertimbangkan relevansi terhadap tuntutan DU-DI. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, tujuan penyelenggaraan SMK adalah bahwa “Pendidikan

Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja mengembangkan sikap profesional”.

Salah satu tema pokok kebijakan pengembangan pendidikan nasional, khususnya pada pendidikan kejuruan untuk dasawarsa mendatang adalah peningkatan relevansi, yaitu relevansi hasil-hasil pendidikan dengan kebutuhan pembangunan pada umumnya, dan kebutuhan DUDI khususnya; serta kebutuhan dan tantangan keahlian (kompetensi) saat ini dan masa datang. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014 (83-2009) menyatakan bahwa :

Pendidikan vokasi dirasa perlu karena memiliki paradigma yang menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar (*demand driven*) guna mendukung pembangunan ekonomi kreatif. Ketersambungan (*link*) diantara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan dan kecocokan (*match*) antara *employee* dengan *employer* menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan vokasi. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian yang dipilih dan ditekuninya.

Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014 (105-106-2009) menyatakan bahwa:

Peningkatan relevansi pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan agar keluaran pendidikan dapat lebih berorientasi pada pemenuhan dunia kerja serta kebutuhan dunia usaha dan industri. Oleh sebab itu,

relevansi proses pendidikan formal dan nonformal perlu diarahkan agar peserta didik, baik di tingkat pendidikan menengah, terutama kejuruan maupun di tingkat pendidikan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Peningkatan relevansi pendidikan yang dilaksanakan pada periode 2010-2014 meneruskan perbaikan rasio peserta didik SMK: SMA dan pendidikan vokasi.

Berdasarkan hasil kenyataan diperoleh indikasi bahwa, sebagian besar lulusan pendidikan kejuruan khususnya program SMK 4 tahun belum menjawab tuntutan program keahlian dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan/perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak mudah dilatih kembali atas kekurangannya. Hal yang sama dikemukakan juga dalam hasil kajian yang diadakan oleh Direktorat Pembinaan SMK (2008: 135) bahwa, masih terdapat kesenjangan kompetensi antara apa yang diberikan di sekolah kejuruan dengan kebutuhan riil pihak industri. Kesesuaian antara kompetensi yang diberikan di sekolah kejuruan dengan yang dibutuhkan dunia industri sekitar 60% sampai 80%, dengan kesenjangan terbesar pada industri besar dan kesenjangan terkecil pada kegiatan wirausaha.

Salah satu Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional adalah perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Perluasan SMK untuk mencapai komposisi ideal jumlah SMK dengan SMA sebanyak 70:30 persen. Pemerintah telah menaruh harapan besar terhadap tingkat kebutuhan SMK agar tetap pada tujuannya yaitu melahirkan tenaga terampil dibidangnya, menanggulangi pengangguran dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini kinerja SMK yang telah ada dewasa ini masih belum optimal. Untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan suatu program baik SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun, maka dapat ditinjau beberapa hal termasuk :

1. Tingkat keterserapnya lulusan baik SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun di DU-DI berdasarkan kompetensi pada program keahliannya yang telah dipilihnya.
2. Tingkat penciptaan lapangan kerja baru bagi dirinya dan masyarakat berdasarkan jiwa kewirausahaan dengan kompetensi pada program keahliannya yang telah dipilihnya baik SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun.
3. Tingkat keterserapan, kuantitas dan kompetisi dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun.

Secara umum, SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun lebih ditujukan untuk menyediakan tenaga kerja tingkat menengah, tetapi perkembangan karir saat ini semakin menuntut tingkat pendidikan, sehingga lulusan SMK terserap pada DU-DI dan sebagian melanjutkan ke perguruan tinggi. Visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41, 2007).

Lulusan SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun lebih banyak terserap di DU-DI sesuai dengan kompetensi keahliannya, sementara sebagian melanjutkan ke perguruan tinggi, membuka usaha baru dan

sebagian masih mengangur. Oleh karena itu ke depan SMK 3 tahun maupun SMK 4 tahun harus berusaha secara keras agar kemampuan mereka makin meningkat, sehingga keterserapan lulusan menjadi makin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA



- Alexander, K. L., & Cook, M. A. 1982. Curricula and Coursework: A Surprise Ending to A Familiar Story. *American Sociological Review*, 47(5): 626-640.
- Amin, M. 2014. Siswa SMK Akan Sekolah 4 Tahun. (<http://m.sindonews.com/read/875305/144/siswa-smk-akan-sekolah-4-tahun>) di akses 28 Februari 2015.
- Anderson, S., Leithwood, K., & Strauss, T. 2010. Leading Data Use In Schools: Organizational Conditions and Practices at the School and District Levels. *Leadership and Policy in Schools*. 9(3): 292-327.
- Andrews, R., & Soder, R. 1987. Principal Instructional Leadership and School Achievement. *Educational Leadership*, 44 (1): 9–11.
- Anton, D. G. and Jordan, P. N., 2004. *School Evaluation for Quality Improvement: Meeting of the Asian Network of Training and Research Institutions in Educational Planning (ANTRIEP)*. Paris: UNESCO- International Institute for Educational Planning.
- Anwar, M.I. 2013. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Attinello, J., Lare, D., & Waters, F. 2006. The Value of Teacher Portfolios for Evaluation and Professional Growth. *NASSP Bulletin*, 90(2): 132-152.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 2013. *Materi Diklat Implementasi Kurikulum 2013 untuk Kepala Sekolah: Kepemimpinan Pembelajaran, Manajemen Perubahan, dan Budaya Sekolah Dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 2014. *Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bamburg, J., & Andrews, R. 1990. School Goals, Principals and Achievement. *School Effectiveness and School Improvement*, 2(3): 175-191.
- Barth, R. 1986. On Sheep and Goats And School Reform. *Phi Delta Kappan*, 68(4): 293-296.
- Barth, R. 2001. Teacher Leader. *Phi Delta Kappan*, 82(6): 443-449.
- Barth, R., & Deal, T. E. 1982. *The Principalship: Views from Without And Within*. Prepared for the National Conference on the Principalship Convened by the National Institute of Education (ERIC Document 224176).
- Beare, H. 2007. Four Decades of Body-Surfing The Breakers of School Reform: Just Waving, Not Drowning. Dalam Townsend T. (Ed.), *International Handbook of School Effectiveness and Improvement* (hlm.27-40). The Netherlands: Springer.
- Belchetz, D., & Leithwood, K. 2007. Successful Leadership: Does Context Matter and if so, How? Dalam C. Day & K. Leithwood (Eds.), *Successful principal leadership in times of change: An international perspective* (hlm. 117–137). Dordrecht, Netherlands: Springer.
- Bell, L., Bolam, R., & Cubillo, L. 2003. *A Systematic Review of the Impact of School Headteachers and Principals on Student Outcomes*. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education.
- Berg, G. A. 2002. *Why distance learning? Higher education administrative practices*. Praeger Publishers, 88 Post Road West, Westport, CT 06881
- Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. 2007. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Fifth Edition. USA: Pearson Education, Inc.

- Bossert, S., Dwyer, D., Rowan, B., & Lee, G. 1982. The Instructional Management Role of the Principal. *Educational Administration Quarterly*, 18(3), 34–64.
- Bridges, E. (1967). Instructional Leadership: A Concept Re-Examined. *Journal of Educational Administration*, 5(2), 136–147.
- Brookover, W., & Lezotte, L. (1977). *Changes in School Characteristics Coincident with Changes in Student Achievement*. East Lansing: Michigan State University Press.
- Bukit, M. 2014. *Strategi dan Inovasi Pendidikan Kejuruan : Dari Kompetensi ke Kompetensi*. Bandung: Alfabeta
- Bush, T. 2003. *Theories of Educational Leadership and Management*. London: SAGE Publications Ltd.
- Center for Educational Leadership. 2012. *4 Dimensions of Instructional Leadership*. College of Education: University of Washington.
- Chamid, A. dan Rochmanudin. 2010. *Lulus SMP/MTS?*. Yogyakarta: Paramitra Publishing.
- Cohen, E., & Miller, R. 1980. Coordination and Control of Instruction in Schools. *Pacific Sociological Review*. 4: 446-473.
- Cooley, W., & Leinhardt, G. 1980. The Instructional Dimensions Study. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 2: 7-25.
- Clarke and Winch (Eds.). 2007. *Vocational Education: International Approaches, Developments and System*. New York: Routledge.
- Creemers, B.P.M. 1994. *The Effective Classroom*. London: Cassell.
- Creswell, J.W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Creswell, J.W. 2009. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. California: Sage Publications, Inc.
- Creswell, J.W. 2012. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Cuban, L. 1984. Transforming the Frog Into A Prince: Effective Schools Research, Policy, and Practice at the District Level. *Harvard Educational Review*, 54(2): 128-151.

- Dharma, S., dkk. 2013. *Tantangan Guru SMK Abad 21*. Jakarta: Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Pendidikan Nasional 2009. *Panduan Penyelenggaraan Program Rintisan SMA Bertaraf Internasional (R-SMA BI)*. Jakarta. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Manajemen Berbasis Sekolah: Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Kepala sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2010. *Kepemimpinan Pembelajaran*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Djojonegoro, W. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Jakarta Agung Offset.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional. 2014. *Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional. Laman Resmi. <http://www.ditpsmk.net/>
- Direktorat Pembinaan SMK. 2014. *Garis-garis Besar Program Pembinaan SMK*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Direktorat Pembinaan SMK. 2015. *Petunjuk Teknis 2015: Bantuan Beasiswa untuk Siswa Berprestasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dwyer, D. 1986. Understanding the Principal's Contribution to Instruction. *Peabody Journal of Education*, 63(1): 3-18.
- Dwyer, D., Lee, G., Rowan, B., & Bossert, S. 1983a. *Five Principals in Action; Perspectives on Instructional Management*. San

- Francisco, CA: Far West Laboratory for Educational Research. ERIC Document number 231085.
- Dwyer, D., Lee, G., Rowan, B., & Bossert, S. 1983b. *The Principal as Instructional Leader: No Single Vision, No Simple Formula*. San Francisco, CA: Far West Laboratory for Educational Research and Development.
- Edmonds, R. 1979. Effective Schools for the Urban Poor. *Educational Leadership*, 37: 15–24.
- Eichhorst W., et al. 2012. *A Roadmap to Vocational Education and Training Systems Around the World*. IZA Discussion Paper No. 7110. Bonn Germany.
- Erickson, D. A. (1979). Research on Educational Administration: The state-of-the-Art. *Educational Researcher*, 8(3): 9–14.
- Finch, C. R. & Crunkilton, J. R. 1984. *Curriculum Development in Vocational and Technical Education*. Easton: Allyn and Bacon, Inc.
- Flick, U. 2009. *An Introduction to Qualitative Research*. California: SAGE Publications Ltd.
- Goldring, E., Cravens, X. C., Murphy, J., & Elliot, S. 2009. The Evaluation of Principals: What and How do States and Urban Districts Assess Leadership? *Elementary School Journal*, 110(1): 19-39.
- Goldring, E., Huff, J., May, H., & Camburn, E. 2008. School Context and Individual Characteristics: What Influences Principal Practice?. *Journal of Educational Administration*, 46(3): 332–352.
- Hadiwaratama. 2002. Perkembangan Pendidikan Kejuruan Pada Pelita III. Dalam Supriadi, D (Ed), *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia: Membangun Manusia Produktif* (hlm. 151-174). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Hallinger, P. 1983. *Assessing the Instructional Management Behavior of Principals*. Unpublished doctoral dissertation, Stanford University, Stanford, CA.
- Hallinger, P. 2000. A Review of Two Decades of Research on the Principalship Using the *Principal Instructional Management*

- Rating Scale*. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Seattle, Washington.
- Hallinger, P. 2003. Leading Educational Change: Reflections on the Practice of Instructional and Transformational Leadership. *Cambridge Journal of Education*, 33 (3): 329–351.
- Hallinger. 2009. *Leadership for 21st Century Schools: From Instructional Leadership to Leadership for Learning*. China: Hong Kong Institute of Education.
- Hallinger, P. 2011a. A Review of Three Decades of Doctoral Studies Using the Principal Instructional Management Rating Scale: A Lens On Methodological Progress in Educational Leadership. *Educational Administration Quarterly*, 47 (2): 271–306.
- Hallinger, P. (2011b). Leadership for Learning: Lessons from 40 Years of Empirical Research. *Journal of Educational Administration*, 49(2): 125–142.
- Hallinger, P., Bickman, L., & Davis, K. 1996. School Context, Principal Leadership, and Student Reading Achievement. *The Elementary School Journal*, 96(5): 527-549.
- Hallinger, P., & Heck, R. H. (1996a). Reassessing The Principal's Role In School Effectiveness: A Review Of Empirical Research, 1980–1995. *Educational Administration Quarterly*, 32(1), 5–44.
- Hallinger, P., & Heck, R. H. (1996b). The Principal's Role In School Effectiveness: An Assessment Of Methodological Progress, 1980–1995. dalam K. Leithwood et al. (Ed.), *International Handbook of Research In Educational Leadership and Administration* (htm. 723–784). New York: Kluwer Press.
- Hallinger, P., & Heck, R. H. 1998. Exploring the Principal's Contribution to School Effectiveness: 1980–1995. *School Effectiveness and School Improvement*, 9(2), 157-191.
- Hallinger, P., & Heck, R. H. 2002. What Do You Call People With Visions? The Role Of Vision, Mission and Goals In School Leadership and Improvement. In K. Leithwood, P. Hallinger et al. (Eds.), *The Handbook of Educational Leadership and Administration* (2nd ed.). Dordrecht: Kluwer.

- Hallinger, P., & Heck, R. H. 2010. Collaborative Leadership and School Improvement: Understanding the Impact on School Capacity and Student Learning. *School Leadership and Management*, 30(2): 95–110.
- Hallinger, P., & Heck, R. H. 2011a. Conceptual and Methodological Issues in Studying School Leadership Effects As A Reciprocal Process. *School Effectiveness and School Improvement*, 22(2): 149–173.
- Hallinger, P., & Heck, R. H. 2011b. Exploring the Journey of School Improvement: Classifying and Analyzing Patterns of Change in School Improvement Processes and Learning Outcomes. *School Effectiveness and School Improvement*, 22(1): 1–27.
- Hallinger, P., & Murphy, J. 1986. The Social Context of Effective Schools. *American Journal of Education*, 94 (3): 328–355.
- Hallinger, P., & Murphy, J. 1985. Assessing the Instructional Leadership Behavior of Principals. *Elementary School Journal*, 86 (2): 217–248.
- Hallinger, P. and Wang, W.C. 2015. *Assessing Instructional Leadership with the Principal Instructional Management Rating Scale*. New York: Springer.
- Hattie, J. 2009. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. New York: Routledge.
- Heck, R. H. 1993. School Context, Principal Leadership, and Achievement: The Case of Secondary Schools in Singapore. *The Urban Review*, 25(2): 151-166.
- Heck, R. H. 2000. Examining the Impact of School Quality on School Outcomes and Improvement: A Value-Added Approach. *Educational Administration Quarterly*, 36(4): 513-552.
- Heck, R. H. 2006. Assessing School Achievement Progress: Comparing Alternative Approaches. *Educational Administration Quarterly*, 42(5): 667-699.
- Heck, R. H., & Hallinger, P. 2009. Assessing the Contribution of Distributed Leadership to School Improvement. *American Educational Research Journal*, 46 (3): 1-54.

- Heck, R. H., & Hallinger, P. 2014. Modeling the Effects of School Leadership on Teaching and Learning Over Time. *Journal of Educational Administration*, 52 (5): 653-681.
- Heck, R. H. Larson, T. & Marcoulides, G. (1990). Instructional Leadership and Student Achievement: Validation of A Causal Model. *Educational Administration Quarterly*, 26 (2): 94-125.
- Ho, D. C. W. 2010. Teacher Participation in Curriculum and Pedagogical Decisions: Insights Into Curriculum Leadership. *Educational Management Administration & Leadership*, 38(5): 613-624.
- Jokosumbogo B. 2002. Dari Instalasi Pendidikan Teknologi (IPT) ke SMK Pembangunan dan BLPT. Dalam Supriadi, D (Ed), *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia: Membangun Manusia Produktif* (hlm. 99-102). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Joyce, B., & Showers, B. 2002. *Student Achievement Through Staff Development (3rd ed.)*. Alexandria, VA: ASCD.
- Kantabutra, S. (2005). Improving Public School Performance Through Vision-Based Leadership. *Asia Pacific Education Review*, 6(2): 124-136.
- Kantabutra, S. (2009). Toward a Behavioral Theory of Vision In Organizational Settings. *Leadership and Organization Development Journal*, 30(4): 319-337.
- Kantabutra, S. (2010). Vision Effects: A Critical Gap in Educational Leadership Research. *International Journal of Educational Management*, 24(5): 376-390.
- Kimball, S. M., White, B., Milanowski, A. T., & Borman, G. 2004. Examining the Relationship Between Teacher Evaluation And Student Assessment Results In Washoe County. *Peabody Journal of Education*, 79(4): 54-78.
- Kirk, D., J. and Jones T. L. 2004. *Assessment Report: Effective Schools*. Pearson Education, Inc.
- Knapp, M., Copland, M., Honig, M., Plecki, M., & Portin, B. 2009. *Learning-Focused Leadership and Leadership Support: Meaning*

- and Practice in Urban Systems*. Center for the Study of Teaching and Policy: University of Washington, Seattle, WA.
- Kurland, H., Peretz, H., & Hertz-Lazarowitz, R. (2010). Leadership Style and Organizational Learning: The Mediate Effect of School Vision. *Journal of Educational Administration*, 48(1): 7-30.
- Leitner, D. 1994. Do principals affect student outcomes: An organizational perspective. *School Effectiveness and School Improvement*, 5(3) : 219-238.
- Leithwood, K., Begley, P. & Cousins, B. 1990. The Nature, Causes and Consequences Of Principals' Practices: An Agenda For Future Research, *Journal of Educational Administration*, 28(4): 5-31.
- Leithwood, K., & Beatty, B. (2008). *Leading with Teacher Emotions In Mind*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Leithwood, K., & Sun, J. P. 2012. The Nature and Effects of Transformational School Leadership: A Meta-Analytic Review of Unpublished Research. *Educational Administration Quarterly*, 48(3): 387-423.
- Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A., & Hopkins, D. 2006. *Seven Strong Claims about Successful School Leadership*. Nottingham, UK: National College of School Leadership.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. 2008. Seven Strong Claims About Successful School Leadership. *School Leadership and Management*, 28(1): 27-42.
- Leithwood, K., Louis, K. S., Anderson, S., & Wahlstrom, K. 2004. *Review of Research: How Leadership Influences Student Learning*. Center for Applied Research and Educational Improvement, University of Minnesota.
- Leonard, J.C. 2010. *Finding the Time for Instructional Leadership: Management Strategies for Strengthening the Academic Program*. USA: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Levine, D. 1982. Successful Approaches for Improving Academic Achievement in Inner-City Elementary Schools. *Phi Delta Kappan*, 63: 523-526.

- Levine, D., & Stark, J. 1982. Instructional and organizational Arrangements That Improve Student Achievement in Inner-City Schools. *Educational Leadership*, 40: 41-46.
- Liu, S., & Zhao, D. (2013). Teacher Evaluation in China: Latest Trends and Future Directions. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 25(3): 231-250.
- Loup, K., Garland, J., Ellett, C., & Rugutt, J. (1996). Ten Years Later: Findings From a Replication of a Study of Teacher Evaluation Practices in Our 100 Largest Districts. *Journal of Personnel Evaluation in Education*, 10(3): 203-226.
- Loukeris, D. et al. 2009. Aspects Of The Effectiveness Of The Greek Holoimero ('All-Day') Primary School. *Mediterranean Journal of Educational Studies*, 14 (2): 161-174.
- Lunenburg, F. C. 2010. *Schools as Open Systems*”, *Schooling*, 1 (1) : 1-5.
- Marks, H., & Printy, S. 2003. Principal Leadership and School Performance: An Integration of Transformation and Instructional Leadership. *Educational Administration Quarterly*, 39(3): 370-397.
- Marshall, K. 1996. How I confronted HSPS (Hyperactive Superficial Principal Syndrome) and Began to Deal with the Heart of the Matter. *Phi Delta Kappan*, 76(5): 336-345.
- Marshall, K. 2004. How I Recovered from HSPS (Hyperactive Superficial Principal Syndrome: A progress Report). *Phi Delta Kappan*, 84(9): 701-709.
- Marzano, et. al. 2005. *School leadership that works : from research to results*. USA: ASCD Member Book
- McNamara, G., Joyce, P., and O’Hara, J., 2010. *Evaluation of Adult Education and Training Programs*. Republic of Ireland: Elsevier Ltd. All rights reserved.
- Mendels, P. 2012. 5 Pivotal Practices That Shape Instructional Leadership: The Effective Principal. *JDS Feature Leadership*, 33(1): 54-58
- Merriam S.B. 2009. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. USA: John Wiley & Sons, Inc.

- Morrell, P.D. & Carroll, J.B. 2010. *Conducting Educational Research*. USA: Sense Publishers.
- Mulyasa, D. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Murphy, J. 1988. Methodological, Measurement and Conceptual Problems in the Study of Instructional Leadership. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 10(2): 117-139.
- Murphy, J., Hallinger, P., & Mitman, A. 1983. Problems With Research on Educational Leadership: Issues to be Addressed. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 5(3): 297-306.
- Norlin, J. M. 2009. *Human Behavior and The Social Environment: Social Systems Theory*. Upper Saddle River, NJ: Allyn & Bacon.
- Oakes, J. 1989. Detracking Schools: Early Lessons From the Field. *Phi Delta Kappan*, 73(6): 448-454.
- Pakpahan, J. 2002. Perkembangan Pendidikan Kejuruan Pada Pelita IV. Dalam Supriadi, D (Ed), *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia: Membangun Manusia Produktif* (hlm. 221-272). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Patton, M.Q. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. California: Sage Publications, Inc.
- Pavlova, M. 2009. *Technology and Vocational Education for Sustainable Development: Empowering Individuals for the Future*. UNESCO-UNEVOC Book Series Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects. Australia: Springer.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

- Kompetensi Guru SMK/MAK. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Pengelolaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Purkey, S. C. & Smith, M. S. 1983. Effective Schools: A Review. *The Elementary School Journal*, 83 (4): 427-452.
- Puyate, S.T. 2008. Constraints to the Effective Implementation of Vocational Education Program in Private Secondary Schools in Port Harcourt Local Government Area. *Asia-Pacific Journal of Cooperative Education*, 9(1); 59-71.

- Rahmadani, 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Perguruan Tinggi dan Kondisi Ekonomi Orang Tua terhadap Minat Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi pada Siswa Kelas III SMK PGRI Padang*. Skripsi S1 Fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Rawita, I. S. 2011. *Mengelola Sekolah Efektif: Perspektif Manajerial dan Ilmu Sekolah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Rigby, J. G. 2014. Three Logics of Instructional Leadership. *Educational Administration Quarterly*, 50: 610-644 (First Published on November 18, 2013). doi:10.1177/00131
- Robinson, V., Lloyd, C., & Rowe, K. 2008. The Impact of Leadership on Student Outcomes: An Analysis of the Differential Effects of Leadership Types. *Educational Administration Quarterly*, 44(5): 635-674
- Rowan, C.S. 2012. *The effectiveness of a Community College's Grow Your Own (GYO) Leadership Development Program*. Dissertations: Seton Hall University.
- Rowe, K. 2007. School and Teacher Effectiveness: Implications of Findings from Evidence-Based Research on Teaching and Teacher Quality. Dalam Townsend T. (Ed.), *International Handbook of School Effectiveness and Improvement* (hlm.767-786). The Netherlands: Springer.
- Reynolds, D., Muijs, D., & Treharne, D. 2003. Teacher Evaluation and Teacher Effectiveness in the United Kingdom. *Journal of Personnel Evaluation in Education*, 17(1): 83-100.
- Saleh, I.M. and Khine, M.S. 2014. *Reframing Transformational Leadership: New School Culture and Effectiveness*. Rotterdam:Sense Publishers
- Sammons, P. Hillman, J. and Mortimore, P. 1995. *Key Characteristics Of effective Schools: A Review of School Effectiveness Research*. London : Crown Copyright.

- Sammons, P. 2007. *School Effectiveness and Equity: Making Connections*. Londonn: CfBT Education Trust
- Sagala, S. 2013. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah*. Bandung: Alfabeta
- Saleem, F., et al. 2012. Determinants of School Effectiveness: A study at Punjab level. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(14) [Special Issue - July 2012]
- Scheerens J., 2000. Improving School Effectiveness. Dalam Jean-Claude Eicher (eds). Published in the series: *Fundamentals of Educational Planning - No. 68*. Paris: UNESCO: International Institute for Educational Planning.
- Scheerens, J. 2012. *School Leadership Effects Revisited: Review and Meta-Analysis of Empirical Studies*. Dordrecht: Springer.
- Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Makassar. (online), (<http://www.smkn2mks.sch.id>), diakses 23 Juni 2015.
- Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Negeri 1 Sulawesi Selatan. (online), (<http://sulselsmkn1.blogspot.co.id/>), diakses 23 Juni 2015.
- Sekolah Menengah Kejuruan 5 Negeri Makassar. (online), (<http://www.smkn5mks.sch.id/>), diakses 23 Juni 2015.
- Sekolah Menengah Kejuruan 5 Negeri Makassar. (online), (<http://www.smkn5-sby.sch.id>), diakses 23 Juni 2015.
- Sergiovanni, T.J. 1996. *Moral Leadership*, Jossey-Bass, San Francisco, CA
- Seyfried, E. 1998. *Evaluation of Quality Aspects in Vocational Training Programmes*. Dalam Steve Bainbridge (Ed.), *Vocational Training European Journal*. (hlm.13-19). France : CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training
- Showers, B. 1985. Teachers Coaching Teachers. *Educational Leadership*, 42 (7): 43-49.
- Siregar K. S. 2002. Pendidikan (Di Indonesia): Dari Zaman Kuno Hingga Zaman Belanda. Dalam Supriadi, D (Ed), *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia: Membangun Manusia Produktif* (hlm. 33-60). Jakarta: Departemen Pendidikan

- Nasional Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Slamet PH. 2001. *Karakteristik Kepala Sekolah Tangguh*. <http://depdiknas.go.id/jurnal-027>
- Sonhadji, A. 2013. *Manusia, Teknologi dan Pendidikan Menuju Peradaban Baru*. Malang: UM Press.
- Sonhadji, A. 2014. *Asesmen Kebutuhan, Pengambilan Keputusan, dan Perencanaan Matarantai dalam Manajemen Pendidikan*. Malang: UM Press.
- Southworth, G. 2002. Instructional Leadership in Schools: Reflections and Empirical Evidence, *School Leadership & Management*, 22(1): 73-92.
- Southworth, G. 2004. *Primary School Leadership in Context: Leading Small, Medium And Large Sized Schools*. London: Taylor and Francis.
- Spillane, J. P. 2006. *Distributed Leadership*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Spradley, J.P. 1980. *Participant Observation*. USA: Rinehart and Winston
- Stringfield, S.C.; Slavin, R.E. 1992. A hierarchical longitudinal model for elementary school effects". In: B.P.M. Creemers and G.J. Reezigt (Eds.), *Evaluation of effectiveness*. ICO-Publication 2.
- Stufflebeam and Shinkfield. 2007. *Evaluation Theory, Models, & Applications*. USA: A Wiley Imprint.
- Sun, J. P., & Leithwood, K. 2015. Direction-Setting School Leadership Practices: A Meta-Analytical Review of Evidence About Their Influence. *School Effectiveness and School Improvement*, doi:10.1080/09243453.2015.1005106. Downloaded February 18, 2015.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teddlie, C., Stringfield, S., & Reynolds, D. 2000. Context Issues Within School Effectiveness Research. dalam C. Teddlie & D. Reynolds

- (Eds.), *International handbook of school effectiveness research* (pp. 160–183). London: Falmer Press.
- Thompson, J. (1968). *Organizations in Action*. New York: McGraw Hill.
- Thompson, J., & McEwen, W. (1958). Organizational Goals and Environment: Goal-Setting as An Interaction Process. *American Sociological Review*, 23: 23-31.
- Tilaar, H.A.R. 2011. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tokmak H. S., et. Al. 2013. Applying the Context, Input, Process, Product Evaluation Model for Evaluation, Research, and Redesign of an Online Master's Program. *The International Review of Reseach in Open and Distance Learning*, 14(3): 273-293.
- Tracy, S.J. 2013. *Qualitative Research Methods*. India: John Wiley & Sons, Ltd
- Ulfatin N 2013. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*
- .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*
- Usman, H. 2012. *Kepemimpinan Pendidikan Kejuruan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Waras, 20 Juni 2014. SMK 4 Tahun Lebih Efektif. (<http://malang-post.com/pendidikan/88566-smk-4-tahun-lebih-efektif>) di akses 28 Februari 2015.
- Weick, K. 1976. Educational Organizations As Loosely Coupled Systems. *Administrative Science Quarterly*, 21: 1-19.
- Weick, K. 1982. Administering Education in Loosely Coupled Schools. *Phi Beta Kappan*, 63(10): 673-676.
- Wellisch, J., MacQueen, A., Carriere, R., & Duck, G. 1978. School Organization and Management In Successful Schools. *Sociology of Education*, 51: 211-226.

- Wena, M. (1996). *Pendidikan Sistem Ganda*. Bandung: Tarsito.
- Wiley, S. 2001. Contextual Effects on Student Achievement: School Leadership and Professional Community. *Journal of Educational Change*, 2(1): 1-33.
- Willig, C. 2013. *Introducing Qualitative Research in Psychology*. New York: McGraw-Hill House.
- Windarto, R. 2013. Minat Siswa Smp Negeri Melanjutkan ke SMK Ditinjau dari Sosial Ekonomi Keluarga di Kabupaten Bantul. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 3(1): 103-116.
- Witziers, B., Bosker, R., & Kruger, M. 2003. Educational Leadership and Student Achievement: The Elusive Search for An Association. *Educational Administration Quarterly*, 34(3): 398-425
- Wukir. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Sekolah*. Yogyakarta: Multi Prasendo
- Wuradji. 2011. *Perilaku Organisasi: Landasan Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: UNY Press.
- Yin, R.K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.
- Ylimaki, R. M. 2006. Toward A New Conceptualization of Vision in the Work of Educational Leaders: Cases of the Visionary Archetype. *Educational Administration Quarterly*. 42(4): 620-651
- Yulk. 2010. *Leadership in Organizations*. USA: Pearson Prentice Hall
- Zais, R. S. 1976. *Curriculum, Principle and Foundations*. New York : Harper and Row, publishers Inc.
- Zhang, G. et. Al. 2011. Using the Context, Input, Process, and Product Evaluation Model (CIPP) as a Comprehensive Framework to Guide the Planning, Implementation, and Assessment of Service-learning Programs. *Journal of Higher Education Outreach and Engagement*, 15(4): 57-83.

PROFIL PENULIS



Dr. Ir. Amiruddin, S.T., M.T., IPM., Lahir di Cinnong-Bone, 18 Februari 1974. Menyelesaikan pendidikan dasar sampai menengan di Kabupaten Bone di SD Negeri 218 Cinnong (sekarang SD Negeri 218 Maroanging) Kecamatan Sibulue tahun 1986. Tamat pendidikan SMP Negeri 1 Pattiro Bajo tahun 1990 dan melanjutkan ke SMA Negeri 1 Watampone dan tamat tahun 1993.

Menyelesaikan program Sarjana. Teknik Mesin bidang Konversi Energi (S1) di Universitas Muslim Indonesia tahun 1997. Menyelesaikan Gelar Magister Teknik Mesin bidang Konversi Energi (S2) di Universitas Hasanuddin Tahun 2005./ Gelar Doktor Pendidikan Kejuruan Khusus Pendidikan Teknik Mesin diraih di Univesitas Negeri Malang pada tahun 2017. Gelar Insinyur Teknik Mesin bidang Konversi Energi di Universitas Hasanuddin Tahun 2021 dan Gelar Insinyur Profesional Madya di Persatuan Insinyur Indonesia Tahun 2021. Diterima menjadi staf pengajar pada pengajar pada Jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2006 sampai sekarang. Adapun mata kuliah yang di ampuh pada Program Studi adalah Matematika Dasar, Matematika Teknik, Fisika Teknik, Mekanika Fluida, Pneumatik dan Hidrolik, Teknik Pengkondisian Udara, Mesin Refrigeran Industri, Konversi Energi (S2), Statistika (S2), Strategi Pembelajaran, Pengantar Pendidikan Kejuruan, Perkembangan Peserta Didik dan Bimbingan Karir, dan Belajar dan Pembelajaran, Disisi lain sebagai staf pengajar, penulis juga aktif dalam melaksanakan penelitian pada bidang Profesional Teknik Mesin dan Bidang Pendidikan Kejuruan, diantaranya; Pengembangan Refrigeran Baru Ramah Lingkungan

(Campuran R-134a dan R-600a) Sebagai Pengganti R-12 Pada Sistem Refrigerasi), Pengembangan Model Pendidikan Sistem Ganda (Dual System) di SMK 3 Tahun dan SMK 4 Tahun, Model Kontinum Pedagogi-Andragogi-Heutagogi di SMK, dan Pengembangan Moda HyFlex di Perguruan Tinggi. Pada bidang Pengabdian Masyarakat diantaranya Ipteks bagi Masyarakat Kelompok Pengrajin Las (Penerapan Teknologi Pengasapan Ikan Sistem Tertutup di Kabupaten Bone).



Wirawan Setialaksana, S.Pd., M.Sc., Lahir di Rappang-Sidrap, 6 Februari 1990. Menyelesaikan pendidikan dasar sampai menengah di Kota Parepare di SD Negeri 85 Parepare. Tamat pendidikan SMP Negeri 4 Parepare tahun 2005 dan melanjutkan ke SMA Negeri 4 Parepare dan tamat tahun 2008. Menyelesaikan program Sarjana Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2012. Menyelesaikan Gelar Magister Matematika konsentrasi Statistika di Universitas Gadjah Mada Tahun 2016. Pertama kali berkecimpung sebagai dosen di IAIN Parepare Tadris Matematika tahun 2017-2019. Kemudian diterima menjadi staf pengajar pada pengajar pada Jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2019 sampai sekarang. Adapun mata kuliah yang di ampuh pada Program Studi adalah Statistika, Statistik dan Probabilistik, dan Aljabar Linear. Selain sebagai staf pengajar, penulis juga aktif dalam melaksanakan penelitian pada bidang pengukuran pendidikan seperti pengembangan instrumen sikap ilmiah, model kontinum pedagogi-andragogi-heutagogi dan model multilevel pada evaluasi program pendidikan profesi guru (PPG) di SMK se-Indonesia.